

**ANALISIS LUAS PENGUNGKAPAN
CORPORATE GOVERNANCE
DALAM LAPORAN TAHUNAN
PERUSAHAAN PUBLIK DI INDONESIA**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

AMILIA KARTIKA RINI
NIM. C2C 308 001

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2010**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Amilia Kartika Rini

Nomor Induk Mahasiswa : C2C308001

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : **ANALISIS LUAS PENGUNGKAPAN
CORPORATE GOVERNANCE DALAM
LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN
PUBLIK DI INDONESIA**

Dosen Pembimbing : Drs. H. Tarmizi Achmad, MBA, Ph.D, Akt

Semarang, 03 September 2010

Dosen Pembimbing,

(Drs. H. Tarmizi Achmad, MBA, Ph.D, Akt)
NIP. 19550418 198603 1001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Amilia Kartika Rini
Nomor Induk Mahasiswa : C2C308001
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : **ANALISIS LUAS PENGUNGKAPAN
CORPORATE GOVERNANCE DALAM
LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN
PUBLIK DI INDONESIA**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 21 September 2010

Tim Penguji:

1. Drs. H. Tarmizi Achmad, MBA, Ph.D, Akt (.....)
2. Drs. PT. Basuki Hadiprajitno, MBA., M.Acc., Akt (.....)
3. Hj. Rr. Sri Handayani, SE., M.Si., Akt (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Amilia Kartika Rini, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **“Analisis Luas Pengungkapan *Corporate Governance* dalam Laporan Tahunan Perusahaan Publik di Indonesia”**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 03 September 2010

Yang membuat pernyataan,

(Amilia Kartika Rini)
NIM: C2C308001

ABSTRACT

This study aimed to analyze the influence of firm characteristics on the level of corporate governance disclosure in annual reports of public companies in Indonesia. Factors tested in this study are company size, firm age listing, ownership dispersion, multinational companies, and the size of the board of commissioners.

Collecting data used a purposive sampling method in companies listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) during the years 2007 and 2008. A total of 126 firms are used as samples in this study. There are 105 items disclosure to detect the level of corporate governance disclosure.

This study used multiple regression is used to examine the factors that influence the level of corporate governance disclosures. The result showed that the independent variables that significantly affect to corporate governance disclosure are the size of company. However, firm age listing, ownership dispersion, multinational companies, and the size of the board of commissioners did not show significant influence to corporate governance disclosure.

Keywords: Annual Reports, Corporate Governance, Corporate Governance Disclosure

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan *corporate governance* dalam laporan tahunan perusahaan publik di Indonesia. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah besaran perusahaan, umur *listing* perusahaan, kepemilikan dispersi, perusahaan multinasional, dan ukuran dewan komisaris.

Pengumpulan data menggunakan metode *purposive sampling* pada perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2007 dan 2008. Sebanyak 126 perusahaan digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini. Terdapat 105 item pengungkapan untuk mendeteksi luas pengungkapan *corporate governance*.

Penelitian ini menggunakan regresi berganda digunakan untuk menguji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen yang berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance* adalah besaran perusahaan. Akan tetapi, umur *listing* perusahaan, kepemilikan dispersi, perusahaan multinasional, dan ukuran dewan komisaris tidak menunjukkan pengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

Kata kunci: Laporan Tahunan, Corporate Governance, Pengungkapan *Corporate Governance*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Analisis Luas Pengungkapan Corporate Governance Dalam Laporan Tahunan Perusahaan Publik Di Indonesia.”** Skripsi ini disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. M. Chabachib, S.E., M.Si., Akt., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
2. Drs. H. Tarmizi Achmad, MBA, Ph.D, Akt, selaku dosen pembimbing. Terima kasih telah meluangkan waktu dan pikiran, memberikan arahan, nasihat, saran, serta bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Drs. H. Sudarno, M.Si., Ph.D, Akt., selaku dosen wali yang selalu memberikan masukan dan bimbingan.
4. Bapak Widiyanto dan Ibu Siswantiningsih, orang tua terhebat yang telah memberikan seluruh kasih sayang dan cinta yang luar biasa kepada penulis. Terima kasih atas doa yang tiada henti, nasihat, serta motivasi setiap saat yang memberikan kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

5. Kakakku dan adikku tersayang, Andrie Nurcahya Irawanto dan Listiani Widyaningsih. Terima kasih atas doa, dukungan, dan motivasinya.
6. Mbah Drs. H. Tidjan Wirjosantosa dan Mbah Siti Baruti. Terima kasih atas doa, kasih sayang, dan nasihat yang senantiasa diberikan kepada penulis.
7. Dra. Sih Darmi Astuti, MSi., ibu kedua bagi penulis. Terima kasih atas saran, nasihat, dan bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini.
8. Om Agus Supriyanto sekeluarga. Terima kasih telah menjadi keluarga kedua yang selalu memberikan cinta dan kebahagiaan selama ini.
9. Keluarga besar Jalan Pemuda 16. Terima kasih atas doa, cinta, dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis.
10. Galih Budi Hermawan. Terima kasih atas doa, kesetiaan, dan motivasi yang selalu diberikan kepada penulis.
11. Sahabat seperjuangan, Mbak Ulfah, Linggar, Bayu, Islami, dan Mbak Ika. Terima kasih atas segala perhatian, bantuan dan dukungannya selama proses penyusunan skripsi ini.
12. Seluruh teman kelas Akuntansi Reguler II 2008, Arfan, Bayu, Diana, Dyah, Edu, Rani, Esti, Fina, Haries, Hasmi, Hesti, Islami, Kharisma, Mbak Ulfah, Linggar, Novika, Priyo, Putri, Shintauli, Sigit, Mbak Choir, Anto, Trisno, Adhy, Aji, dan Mbak Ika. Terima kasih atas kekompakan kita selama ini.
13. Sahabat-sahabat terkasih, Teem, Andita, Nurin, Ratna, Ita, Haryo, dan Rais. Terima kasih atas persahabatan yang telah kita ukir selama ini.

14. Teman-teman kos di Jalan Singosari X 13A. Terima kasih untuk kebersamaan kita selama ini.
15. Amanah II Blok D6: Mbak Putri, Ratna, Kak Indah, Mbak Tia, Isti, Wulan, Lusi, Leli, Mbak Lia, Dini, dan Eka. Terima kasih telah menjadi keluarga yang penuh keceriaan bagi penulis.
16. Mbak Tia. Terima kasih atas bantuan dan dukungannya kepada penulis.
17. Mas Aziz di Pojok BEI. Terima kasih atas bantuannya kepada penulis.
18. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, demi penyempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan saran, pendapat dan kritik dari pembaca dan dengan rendah hati penulis akan menerimanya.

Akhirnya penulis hanya dapat mengharapkan semoga amal baik tersebut akan mendapat Rahmat serta Karunia dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak sebagaimana mestinya.

Semarang, 03 September 2010

Penulis,

Amilia Kartika Rini

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	8
1.3.2 Kegunaan Penelitian	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TELAAH PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Teori Agensi	11
2.1.2 Luas Pengungkapan dalam Laporan Tahunan.....	12
2.1.3 <i>Corporate Governance</i>	14
2.1.4 Luas Pengungkapan <i>Corporate Governance</i>	17
2.1.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan <i>Corporate Governance</i>	19
2.1.5.1 Besaran Perusahaan	19
2.1.5.2 Umur <i>Listing</i> Perusahaan	21
2.1.5.3 Kepemilikan Dispersi.....	21
2.1.5.4 Perusahaan Multinasional	22
2.1.5.5 Ukuran Dewan Komisaris.....	23
2.2 Penelitian Terdahulu	24
2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian	29
2.4 Pengembangan Hipotesis	30
2.4.1 Pengaruh Besaran Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan <i>Corporate Governance</i>	30
2.4.2 Pengaruh Umur <i>Listing</i> Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan <i>Corporate Governance</i>	31
2.4.3 Pengaruh Kepemilikan Dispersi Terhadap Luas Pengungkapan <i>Corporate Governance</i>	31

2.4.4	Pengaruh Perusahaan Multinasional Terhadap Luas Pengungkapan <i>Corporate Governance</i>	32
2.4.5	Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Luas Pengungkapan <i>Corporate Governance</i>	33
BAB III	METODE PENELITIAN	34
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	34
3.1.1	Variabel Dependen	34
3.1.2	Variabel Independen	35
3.1.2.1	Besaran Perusahaan	35
3.1.2.2	Umur <i>Listing</i> Perusahaan	36
3.1.2.3	Kepemilikan Dispersi	36
3.1.2.4	Perusahaan Multinasional	36
3.1.2.5	Ukuran Dewan Komisaris	36
3.2	Populasi dan Sampel	37
3.3	Jenis dan Sumber Data	38
3.4	Metode Pengumpulan Data	38
3.5	Metode Analisis Data	38
3.5.1	Analisis Statistik Deskriptif	38
3.5.2	Analisis Regresi Berganda	39
3.5.3	Uji Asumsi Klasik	39
3.5.3.1	Uji Normalitas	40
3.5.3.2	Uji Multikolinearitas	41
3.5.3.3	Uji Heteroskedastisitas	42
3.5.4	Uji Hipotesis	42
3.5.4.1	Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)	42
3.5.4.2	Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)	43
3.5.4.3	Uji Koefisien Determinasi (R^2)	43
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	45
4.1	Deskripsi Objek Penelitian	45
4.2	Analisis Data	48
4.2.1	Uji Asumsi Klasik	48
4.2.1.1	Uji Normalitas	48
4.2.1.2	Uji Multikolinearitas	51
4.2.1.3	Uji Heteroskedastisitas	52
4.2.2	Analisis Regresi Berganda	53
4.3	Intepretasi Hasil	56
4.3.1	Pengaruh Besaran Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan <i>Corporate Governance</i>	56
4.3.2	Pengaruh Umur <i>Listing</i> Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan <i>Corporate Governance</i>	57
4.3.3	Pengaruh Kepemilikan Dispersi Terhadap Luas Pengungkapan <i>Corporate Governance</i>	58
4.3.4	Pengaruh Perusahaan Multinasional Terhadap Luas Pengungkapan <i>Corporate Governance</i>	59

4.3.5	Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Luas Pengungkapan <i>Corporate Governance</i>	60
BAB V	PENUTUP	62
5.1	Kesimpulan.....	62
5.2	Keterbatasan	63
5.3	Saran.....	64
	DAFTAR PUSTAKA	65
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	68

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	26
Tabel 4.1 Gambaran Umum Sampel penelitian	45
Tabel 4.2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Indeks Pengungkapan <i>Corporate Governance</i> pada Perusahaan Multinasional dan Perusahaan Nasional	46
Tabel 4.3 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	47
Tabel 4.4 Hasil Uji <i>Kolmogorov Smirnov Z</i>	50
Tabel 4.5 Hasil Uji <i>Skewness dan Kurtosis</i>	50
Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas.....	51
Tabel 4.7 Hasil Analisis Regresi Berganda.....	53
Tabel 4.8 Ringkasan Hasil Hipotesis Penelitian	56

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar	2.1 Model Kerangka Pemikiran Penelitian.....	30
Gambar	4.1 Grafik Histogram.....	49
Gambar	4.2 Grafik <i>Normal P-P Plot</i>	49
Gambar	4.3 Grafik <i>Scatter Plot</i>	52

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Daftar Perusahaan Sampel Penelitian	68
Lampiran B Daftar <i>Item</i> Pengungkapan <i>Corporate Governance</i>	73
Lampiran C Data Variabel Penelitian	79
Lampiran D Hasil Analisis Regresi Berganda	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengungkapan informasi secara terbuka mengenai perusahaan sangatlah penting bagi perusahaan publik. Hal ini dilakukan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas manajemen perusahaan kepada *stakeholders*. Keterbukaan informasi dari perusahaan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi *stakeholders* dalam pengambilan keputusan (Almilia dan Retrinasari, 2007).

Laporan tahunan merupakan perangkat utama untuk menyampaikan informasi yang digunakan oleh manajemen kepada pihak-pihak di luar perusahaan yang mempunyai kepentingan di perusahaan tersebut. Laporan tahunan mengkomunikasikan kondisi keuangan dan informasi lainnya kepada pemegang saham, kreditur dan pengguna informasi lainnya. Kualitas informasi dapat dilihat dari sejauh mana luas pengungkapan laporan tahunan yang dibuat oleh perusahaan (Murtanto dan Elvina, 2005).

Cadbury (dalam Bhuiyan dan Biswas, 2007) menyatakan bahwa pengungkapan *corporate governance* penting untuk dilakukan. Dengan adanya pengungkapan *corporate governance* yang akurat, tepat waktu, dan terbuka (*transparan*), maka akan menambah nilai (*value*) bagi semua *stakeholder*. Sebaliknya, tanpa adanya pengungkapan *corporate governance* yang jelas, para *stakeholder* tidak dapat mengetahui bahwa kegiatan pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh manajemen benar-benar untuk kepentingan mereka.

Corporate governance adalah suatu konsep tata kelola perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui pengawasan atau pemantauan kinerja manajemen dan menjamin pertanggungjawaban manajemen kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Perhatian terhadap isu *corporate governance* secara internasional dipicu oleh berbagai skandal spektakuler seperti Enron, Worldcom, Tyco, dan lain-lain. *Corporate governance* sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru atau inovasi, tetapi kewaspadaan publik terhadap pentingnya *good corporate governance* baru terbentuk beberapa tahun terakhir (Kusumawati, 2007).

Iskandar dan Chamlou (dalam Hidayah, 2008) menyatakan bahwa krisis ekonomi yang terjadi di kawasan Asia Tenggara dan negara lainnya bukan hanya akibat dari faktor ekonomi makro tetapi juga karena lemahnya *good corporate governance* yang ada pada negara tersebut, seperti lemahnya hukum, standar akuntansi dan pemeriksaan keuangan (*auditing*) yang belum mapan, pasar modal yang masih *non-regulated*, lemahnya pengawasan komisaris, dan terabaikannya hak minoritas. Pendapat serupa dinyatakan oleh Johnson dkk (dalam Darmawati dkk, 2005) bahwa lemahnya *corporate governance* sering disebut sebagai salah satu penyebab krisis keuangan di negara-negara Asia. Oleh karena itu, *corporate governance* menjadi salah satu bahasan penting dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang stabil di masa yang akan datang.

Berkembangnya isu mengenai *corporate governance* akan mendorong adanya peningkatan perhatian pada masalah pengungkapan dari aspek *corporate governance* suatu perusahaan, baik oleh investor maupun pemerintah melalui

penyusunan peraturan atau standar *corporate governance*. Survei yang dilakukan oleh McKinsey dan Co (dalam Isgiyarta dan Tristiarini, 2005) menjelaskan bahwa pada 189 perusahaan publik di enam *emerging market*, yaitu: India, Malaysia, Meksiko, Korea Selatan, Taiwan, dan Turki menunjukkan eratnya kaitan antara penerapan *good corporate governance* dengan harga saham perusahaan-perusahaan tersebut. Hal tersebut disebabkan hampir 75% investor menganggap keterbukaan dan informasi mengenai penerapan *corporate governance* sama pentingnya dengan informasi keuangan yang dipublikasikan oleh suatu perusahaan. Investor bersedia memberikan insentif yang cukup tinggi kepada perusahaan yang menerapkan prinsip *corporate governance*. Bahkan beberapa pihak menganggap informasi mengenai penerapan *corporate governance* lebih penting daripada laporan keuangan perusahaan.

Di Asia tidak terkecuali Indonesia, isu mengenai *corporate governance* mulai mengemuka setelah terjadinya krisis ekonomi berkepanjangan pada pertengahan tahun 1997. Krisis tersebut mengakibatkan fluktuasi yang luar biasa pada nilai tukar rupiah terhadap nilai mata uang asing. Dampak dari krisis ekonomi tersebut menurunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 1998 yang mencapai minus 13% (Lastanti, 2005).

Indonesia memberikan respon yang baik terhadap perkembangan isu mengenai *good corporate governance*. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya *good corporate governance*. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah membentuk suatu komite pada tahun 1999 yang tugasnya merekomendasikan pedoman umum *good*

corporate governance yang pertama, yaitu Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG). Pembentukan komite ini berdasarkan Keputusan Menko Ekuin Nomor: KEP/31/M.EKUIIN/08/1999. Pedoman umum *good corporate governance* telah beberapa kali disempurnakan, terakhir pada tahun 2001. Pedoman tersebut dipublikasikan sebagai panduan bagi perusahaan di Indonesia dalam mengimplementasikan prinsip *good corporate governance*, termasuk rekomendasi mengenai keharusan membuat pengungkapan praktek *good corporate governance*.

Pada bulan November tahun 2004, berdasarkan Keputusan Menko Bidang Perekonomian Nomor: KEP/49/M.EKON/11/2004, KNKCG diubah menjadi Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yang terdiri dari Sub-Komite Publik dan Sub-Komite Korporasi. Dalam pembentukan komite ini menghasilkan pedoman umum *good corporate governance* tahun 2006. Pedoman ini bukan merupakan peraturan perundangan sehingga tidak memiliki ketentuan hukum yang mengikat.

BAPEPAM melalui keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-134/BL/2006 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik menyatakan bahwa laporan tahunan wajib memuat uraian singkat mengenai penerapan *corporate governance* perusahaan yang telah dan akan dilaksanakan oleh perusahaan dalam periode laporan keuangan tahunan terakhir. Peraturan ini berlaku untuk penyusunan laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada atau setelah tanggal 31 Desember 2006.

Labelle (dalam Kusumawati, 2007) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan praktik *corporate governance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pengungkapan praktek *corporate governance* kemungkinan tidak sama dengan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan *financial disclosure*. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan *corporate governance*, yaitu faktor karakteristik spesifik perusahaan dan faktor *corporate governance* itu sendiri.

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Kusumawati (2007). Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya pengaruh besaran perusahaan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*. Besaran perusahaan dilihat dari besarnya total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin besar perusahaan, maka akan semakin dikenal oleh publik sehingga mengungkapkan lebih banyak informasi merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan akuntabilitas publik. Temuan ini berbeda dengan hasil penelitian Murtanto dan Elvina (2005) yang menemukan bahwa besaran perusahaan tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan.

Umur *listing* perusahaan merupakan lamanya perusahaan beroperasi menjadi perusahaan publik (Bhuiyan dan Biswas, 2007). Perusahaan dengan umur yang lebih lama akan memiliki pengalaman yang lebih banyak dalam mempublikasikan laporan tahunan. Hal ini dikarenakan perusahaan tersebut lebih mengetahui kebutuhan penggunaanya dan informasi yang lebih detail mengenai

perusahaan yang harus dibuka kepada pihak-pihak di luar manajemen yang berkepentingan terhadap perusahaan. Dalam penelitian Yularto dan Chariri (2002), ditunjukkan bahwa umur perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Marwata (2000), Simanjuntak dan Widiastuti (2004), Alsaeed (2006), dan Bhuiyan dan Biswas (2007) menunjukkan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh luas pengungkapan.

Alsaeed (2006) menunjukkan bahwa kepemilikan dispersi mempengaruhi luas pengungkapan, yang dinyatakan dengan perbandingan antara jumlah saham yang dimiliki oleh investor individu dengan jumlah saham yang beredar. Dalam mendapatkan modal, salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan adalah dengan menjual sahamnya. Semakin banyak saham yang dijual, maka semakin banyak pula saham yang dimiliki investor individu di luar perusahaan. Hal ini menyebabkan *item-item* informasi yang diungkapkan juga semakin luas karena pihak yang membutuhkan informasi tentang perusahaan semakin banyak.

Perusahaan multinasional merupakan perusahaan yang lingkup usahanya lebih dari satu negara. Karena memiliki jaringan yang luas di berbagai negara, memungkinkan perusahaan multinasional melakukan pengungkapan secara lebih luas dibandingkan dengan perusahaan nasional. Hossain dan Khan (2006) membuktikan adanya pengaruh positif perusahaan multinasional terhadap luas pengungkapan *corporate governance*, sedangkan dalam penelitian Bhuiyan dan Biswas (2007) perusahaan multinasional tidak mempengaruhi luas pengungkapan *corporate governance*.

Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah anggota dewan komisaris perusahaan (Sembiring, 2005). Dewan komisaris bertanggung jawab mengawasi dan memberi nasihat kepada direksi. Semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka kinerja direksi semakin efektif sehingga pengungkapan yang dilakukan semakin luas.

Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena pengungkapan terhadap *corporate governance* dianggap penting sebagai wujud pertanggungjawaban manajemen (agen) kepada pemilik (prinsipal). Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka judul skripsi ini adalah **“Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan *Corporate Governance* dalam Laporan Tahunan Perusahaan Publik di Indonesia.”**

1.2 Rumusan Masalah

Pada penelitian terdahulu, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi luas pengungkapan *corporate governance*. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah besaran perusahaan, umur *listing* perusahaan, kepemilikan dispersi, perusahaan multinasional, dan ukuran dewan komisaris. Berdasarkan latar belakang tersebut, dalam skripsi ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah besaran perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*?
2. Apakah umur *listing* perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*?

3. Apakah kepemilikan dispersi berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*?
4. Apakah perusahaan multinasional berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*?
5. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah menguji secara empiris:

1. Pengaruh besaran perusahaan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.
2. Pengaruh umur *listing* perusahaan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.
3. Pengaruh kepemilikan dispersi terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.
4. Pengaruh perusahaan multinasional terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.
5. Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu:

1. Bagi perusahaan, sebagai bahan masukan dan informasi tambahan mengenai pentingnya penerapan dan pengungkapan *corporate governance*.
2. Bagi calon investor, sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan investasi.
3. Bagi calon kreditur, sebagai bahan pertimbangan dalam kaitannya dengan pemberian kredit pada perusahaan.
4. Bagi peneliti berikutnya, sebagai acuan untuk mengembangkan pengungkapan *corporate governance* secara lebih luas.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV, dan Bab V. Bab I adalah Pendahuluan. Pada bab I ini dijelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. Bab II adalah Telaah Pustaka yang berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini serta beberapa peneliti terdahulu. Pada bab ini juga dijelaskan mengenai kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. Bab III menjelaskan Metode Penelitian yang memuat definisi operasional variabel penelitian, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian. Bab IV adalah Hasil dan Analisis yang menguraikan tentang deskripsi objek

penelitian, analisis data, serta interpretasi data berdasarkan alat dan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Bab V adalah Penutup yang membahas tentang kesimpulan dari penelitian ini, keterbatasan, dan saran-saran untuk penelitian berikutnya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Teori agensi (*agency theory*) merupakan dasar yang digunakan perusahaan untuk memahami *corporate governance*. Hal yang dibahas dalam teori ini adalah hubungan antara prinsipal (pemilik dan pemegang saham) dan agen (manajemen). Hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara prinsipal dan agen (Jensen and Meckling, 1976). Inti dari hubungan keagenan adalah terdapat pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Prinsipal akan menyediakan fasilitas dan dana untuk menjalankan perusahaan serta mendelegasikan kebijakan pembuatan keputusan kepada agen. Prinsipal memiliki harapan bahwa agen akan menghasilkan *return* dari uang yang mereka investasikan. Di lain pihak, agen memiliki kewajiban untuk mengelola perusahaan sesuai dengan keinginan prinsipal. Sebagai wujud dari akuntabilitas manajemen kepada pemilik, setiap periode manajemen memberikan laporan mengenai informasi perusahaan kepada pemiliknya.

Dalam teori agensi, diasumsikan bahwa masing-masing individu cenderung untuk mementingkan diri sendiri. Hal ini menimbulkan adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Prinsipal memiliki kepentingan untuk memaksimalkan keuntungan mereka sedangkan agen memiliki kepentingan untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologisnya. Konflik akan

terus meningkat karena prinsipal tidak dapat mengawasi aktivitas agen sehari-hari untuk memastikan bahwa agen telah bekerja sesuai dengan keinginan dari prinsipal. Salah satu cara untuk mengurangi konflik antara agen dan prinsipal ini adalah melalui pengungkapan informasi oleh manajemen (agen), dimana sejalan dengan berkembangnya isu mengenai *corporate governance*. Dengan demikian, diharapkan agen dapat bekerja memenuhi permintaan dari prinsipal. Hal ini akan meningkatkan perhatian terhadap masalah pengungkapan pada aspek *corporate governance* suatu perusahaan.

2.1.2 Luas Pengungkapan dalam Laporan Tahunan

Laporan tahunan berisi pengungkapan informasi yang dapat membantu *stakeholders* dalam pengambilan keputusan. Informasi yang diungkapkan tidak hanya berupa informasi keuangan saja, tetapi juga berupa informasi non keuangan. Selain digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, pengungkapan dalam laporan tahunan juga digunakan sebagai bentuk akuntabilitas manajemen atas kinerjanya sebagai pengelola perusahaan kepada investor sebagai pemilik.

Kusumawati (2007) menyatakan bahwa dalam studi-studi yang telah dilakukan selama ini, pengungkapan laporan tahunan dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu jenis pengungkapan umum dan pengungkapan tertentu. Pengungkapan umum berupa pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan yang diharuskan oleh peraturan yang berlaku dalam hal ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, sedangkan pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang melebihi dari yang diwajibkan. Pengungkapan tertentu meliputi: *financial disclosure*, *social*

responsibility disclosure, environmental disclosure, termasuk pengungkapan aspek tata kelola perusahaan (*corporate governance*).

Di Indonesia, BAPEPAM telah mengatur bentuk dan isi laporan tahunan yang wajib diungkapkan melalui Keputusan Ketua BAPEPAM dan Lembaga Keuangan No. KEP-134/BL/2006 peraturan X.K.6 tanggal 07 Desember 2006 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan-perusahaan publik. Dalam ketentuan umum bentuk dan isi laporan tahunan, disebutkan bahwa :

“Laporan tahunan wajib memuat ikhtisar data keuangan penting, laporan dewan komisaris, laporan direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen, tata kelola perusahaan, tanggung jawab direksi atas laporan keuangan, dan laporan keuangan yang telah diaudit.”

Hal itu menunjukkan bahwa setiap perusahaan di Indonesia wajib membuat laporan tahunan perusahaan yang terdiri dari:

- a. ikhtisar data keuangan penting
- b. laporan dewan komisaris
- c. laporan dewan direksi
- d. profil perusahaan
- e. analisis dan pembahasan manajemen
- f. tata kelola perusahaan
- g. tanggung jawab direksi atas laporan keuangan
- h. laporan keuangan yang telah diaudit

Darrough (dalam Na'im dan Rakhman, 2000) mengemukakan bahwa ada dua jenis pengungkapan dalam hubungannya dengan persyaratan yang ditetapkan standar, yaitu:

1. Pengungkapan Wajib (*Mandatory Disclosure*)

Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku. Apabila perusahaan tidak bersedia untuk mengungkapkan informasi secara sukarela, pengungkapan wajib memaksa perusahaan untuk mengungkapkannya.

2. Pengungkapan Sukarela (*Voluntary Disclosure*)

Pengungkapan sukarela merupakan butir-butir yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku. Healy dan Palepu (dalam Simanjuntak dan Widiastuti, 2004) mengemukakan meskipun semua perusahaan publik diwajibkan untuk memenuhi pengungkapan minimum, perusahaan berbeda secara substansial dalam hal jumlah tambahan informasi yang diungkapkan ke pasar modal. Salah satu cara meningkatkan kredibilitas perusahaan adalah melalui pengungkapan sukarela secara lebih luas dan membantu investor dalam memahami strategi bisnis manajemen.

2.1.3 Corporate Governance

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mendefinisikan *corporate governance* sebagai berikut:

“Corporate governance is the system by which business corporations are directed and controlled. The corporate governance structure specifies the distribution of right and responsibilities among different participants in the corporation, such as the board, managers, shareholders and other

stakeholders, and spells out the rules and procedures for making decisions on corporate affairs. By doing this, it also provides the structure through which the company objectives are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance” (OECD, 1999:9).

OECD melihat *corporate governance* sebagai suatu sistem dimana sebuah perusahaan atau entitas bisnis diarahkan dan diawasi. Sejalan dengan itu, maka struktur dari *corporate governance* menjelaskan distribusi hak-hak dan tanggungjawab dari masing-masing pihak yang terlibat dalam sebuah bisnis, yaitu antara lain dewan komisaris dan direksi, manajer, pemegang saham, serta pihak-pihak lain yang terkait sebagai *stakeholders*. Selanjutnya, struktur dari *corporate governance* juga menjelaskan bagaimana aturan dan prosedur dalam pengambilan dan keputusan kebijakan sehingga dengan melakukan itu semua maka tujuan perusahaan dan pemantauan kinerjanya dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan dengan baik.

Dalam penelitian Isgiyarta dan Tristiarini (2005), Malaysian High Level Finance Committee on Corporate Governance mendefinisikan *corporate governance* sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan urusan-urusan perusahaan dalam rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan pihak-pihak lain.

Untuk dapat menerapkan *good corporate governance* dalam perusahaan, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) mengeluarkan asas-asas dalam

pedoman umum *good corporate governance* Indonesia tahun 2006 yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Transparansi (*Transparency*)

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas *good corporate governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

2.1.4 Luas Pengungkapan *Corporate Governance* dalam Laporan Tahunan

Laporan tahunan merupakan sumber utama dalam melakukan penelitian mengenai pengungkapan *corporate governance*. Hal ini dikarenakan laporan tahunan berisi tentang berbagai macam informasi mengenai perusahaan termasuk praktik *good corporate governance*. Karim *et al.* (dalam Bhuiyan dan Biswas, 2007) berpendapat bahwa laporan tahunan harus dipertimbangkan sebagai sumber informasi paling penting mengenai perusahaan. Selain itu, Bushman dan Smith (dalam Bhuiyan dan Biswas, 2007) berpendapat bahwa tujuan yang mendasari adanya penelitian mengenai *corporate governance* dalam akuntansi adalah untuk menyediakan bukti sejauh mana informasi yang diberikan dalam sistem akuntansi dapat mengurangi masalah keagenan. Dalam penelitian ini, pengungkapan *corporate governance* pada laporan tahunan tidak terbatas pada pengungkapan yang diwajibkan oleh pemerintah sehingga pengungkapan di luar persyaratan minimal dianggap sebagai pengungkapan sukarela.

Dalam Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia bab VII mengenai pernyataan tentang penerapan pedoman *good corporate governance* dalam prinsip dasarnya dinyatakan bahwa:

“Setiap perusahaan harus membuat pernyataan tentang kesesuaian penerapan *good corporate governance* dengan Pedoman Good Corporate Governance ini dalam laporan tahunannya. Pernyataan tersebut harus disertai informasi penting lain yang berkaitan dengan penerapan *good corporate governance*. Dengan demikian, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk regulator, dapat menilai sejauh mana Pedoman Good Corporate Governance pada perusahaan tersebut telah diterapkan.”

Bhuiyan dan Biswas (2007) mengidentifikasi sebanyak 45 *item* pengungkapan untuk mendeteksi adanya pengungkapan *corporate governance* di Bangladesh. *Item-item* tersebut diperoleh dari *Guidance on Good Practices in Corporate Governance Disclosure* yang dikeluarkan oleh *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD). Dalam UNCTAD, dibedakan menjadi dua bagian, yaitu pengungkapan informasi keuangan dan pengungkapan informasi non keuangan. Pengungkapan pada informasi keuangan terdiri dari sembilan *item* pengungkapan, sedangkan pengungkapan informasi non keuangan sejumlah 36 *item* pengungkapan.

Karena terdapat ketidakrelevanan beberapa *item* pengungkapan yang dikeluarkan oleh UNCTAD dengan kondisi perusahaan di Indonesia, maka dalam penelitian ini tidak menggunakan *item* pengungkapan tersebut. *Item-item* pengungkapan yang digunakan berupa *item* yang diwajibkan dalam Keputusan Ketua BAPEPAM dan Lembaga Keuangan Nomor KEP/134/BL/2006 Peraturan X.K.6. Selain *item* yang diwajibkan oleh BAPEPAM, penelitian ini juga

menggunakan *item-item* yang diperoleh dari Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).

Berdasarkan peraturan dan pedoman tersebut, diperoleh sebanyak 16 *point item* yang terdiri dari pemegang saham; dewan komisaris; dewan direksi; komite audit; komite nominasi dan remunerasi; komite manajemen risiko; komite-komite lain yang dimiliki perusahaan; sekretaris perusahaan; pelaksanaan pengawasan dan pengendalian internal; manajemen risiko perusahaan; perkara penting yang dihadapi oleh perusahaan, anggota dewan direksi, dan anggota dewan komisaris; akses informasi dan data perusahaan; etika perusahaan; tanggung jawab sosial; pernyataan penerapan *good corporate governance*; dan informasi penting lainnya yang berkaitan dengan penerapan *good corporate governance*. Enam belas *point item* tersebut memuat 105 *item* pengungkapan yang digunakan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah mengungkapkan informasi mengenai *corporate governance*.

2.1.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan *Corporate Governance*

2.1.5.1 Besaran Perusahaan

Pada umumnya perusahaan besar akan mengungkapkan informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan kecil. Ada beberapa penjelasan yang menunjukkan bahwa besaran perusahaan dapat berpengaruh terhadap luas pengungkapan. Pertama, teori agensi menyatakan bahwa perusahaan besar memiliki biaya keagenan yang lebih besar daripada perusahaan kecil (Jensen dan

Meckling, 1976) . Perusahaan besar mungkin akan mengungkapkan informasi yang lebih banyak sebagai upaya untuk mengurangi biaya keagenan.

Kedua, perusahaan besar menghadapi biaya politis yang lebih besar daripada perusahaan kecil. Perusahaan besar merupakan entitas yang banyak disorot oleh pasar maupun publik secara umum. Mengungkapkan lebih banyak informasi merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk mewujudkan akuntabilitas publik.

Terakhir, perusahaan besar memiliki sumber daya yang besar. Dengan sumber daya yang besar tersebut perusahaan perlu dan mampu membiayai penyediaan informasi untuk kepentingan internal. Informasi tersebut sekaligus menjadi bahan untuk keperluan pengungkapan informasi kepada pihak eksternal, sehingga tidak perlu ada tambahan biaya yang besar untuk dapat melakukan pengungkapan dengan lebih lengkap.

Sebaliknya, perusahaan dengan sumber daya yang kecil mungkin tidak memiliki cukup banyak informasi sehingga perlu ada tambahan biaya yang relatif besar untuk dapat melakukan pengungkapan selengkap yang dilakukan oleh perusahaan besar. Perusahaan kecil umumnya berada pada situasi persaingan yang ketat dengan perusahaan lain. Mengungkapkan terlalu banyak tentang jati dirinya kepada pihak eksternal dapat membahayakan posisinya dalam persaingan, sehingga perusahaan kecil cenderung untuk tidak melakukan pengungkapan selengkap perusahaan besar Singhvi dan Desai; Buzby (dalam Marwata, 2001).

2.1.5.2 Umur *Listing* Perusahaan

Menurut Yularto dan Chariri (2003), umur perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan dapat tetap bertahan atau eksis, mampu bersaing, dan memanfaatkan peluang bisnis dalam suatu perekonomian. Perusahaan yang memiliki umur lebih tua mungkin akan meningkatkan praktik pengungkapan dari waktu ke waktu. Hal ini dikarenakan perusahaan yang lebih tua dianggap telah memiliki lebih banyak pengalaman dalam pengungkapan laporan tahunannya. Perusahaan yang telah memiliki pengalaman lebih banyak akan lebih memahami kebutuhan penggunanya dan informasi yang lebih detail mengenai perusahaan yang harus dibuka kepada pihak-pihak di luar manajemen yang berkepentingan terhadap perusahaan.

2.1.5.3 Kepemilikan Dispersi

Haniffa and Cooke (dalam Kusumawati, 2007) mengklasifikasikan struktur kepemilikan saham menjadi dua, yaitu kepemilikan terkonsentrasi (*concentrated ownership*) dan kepemilikan dispersi (*dispersed ownership*). Kepemilikan terkonsentrasi adalah kepemilikan mayoritas saham oleh pihak manajerial. Sedangkan menurut Alsaeed (2006), kepemilikan dispersi diwakili oleh persentase saham yang dimiliki oleh investor individu di luar manajemen selain pemerintah, institusi nasional dan asing, serta kalangan keluarga.

Dalam teori agensi, dinyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat kepemilikan dispersi yang tinggi akan melakukan pengungkapan yang tinggi pula. Hal ini terjadi karena dengan adanya kepemilikan dispersi, pemilik akan meminta

pengungkapan lebih untuk mengawasi perilaku oportunistik manajemen dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki kepemilikan terkonsentrasi.

Na'im dan Rakhman (2000) mengatakan bahwa jika kepemilikan manajerial semakin besar, maka akan semakin sedikit informasi yang akan diungkapkan dalam laporan tahunan karena manajer memiliki akses yang luas terhadap informasi perusahaan tanpa harus melalui laporan tahunan yang dipublikasi. Sebaliknya, semakin banyak saham dimiliki oleh investor individu, maka akan semakin banyak informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan, karena investor ingin memperoleh informasi seluas-luasnya tentang perusahaan tempat ia berinvestasi serta dapat mengawasi kegiatan manajemen.

2.1.5.4 Perusahaan Multinasional

Berdasarkan lingkup kegiatan usaha, perusahaan dibedakan menjadi dua, yaitu perusahaan multinasional dan perusahaan nasional. Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang kegiatan usahanya mencakup berbagai negara. Sedangkan perusahaan nasional merupakan perusahaan di mana lingkup kegiatan usahanya hanya dalam suatu negara.

Menurut Nizamuddin (2007), perusahaan multinasional adalah perusahaan yang beroperasi tidak hanya pada suatu negara. Perusahaan multinasional yang beroperasi di negara asal disebut perusahaan induk, sedangkan perusahaan multinasional yang beroperasi di negara lain disebut sebagai perusahaan anak. Ada empat karakteristik perusahaan multinasional yang digunakan untuk membedakan dengan perusahaan lain. Pertama, perusahaan multinasional memiliki birokrasi yang berkualitas dan terorganisasi. Dalam birokrasi ini terdapat

aturan dan prosedur tersendiri untuk mengatur kegiatan perusahaan multinasional. Kedua, perusahaan multinasional mengoperasikan jenis kegiatan bisnis tertentu. Ketiga, perusahaan multinasional melakukan fungsi secara lintas batas nasional. Terakhir, terdapat integritas yang tinggi antar unit-unit perusahaan multinasional sebagai hasil dari komunikasi dan transportasi yang maju.

Dalam menjalankan operasinya, perusahaan multinasional cenderung bertindak dengan menghindari setiap kemungkinan risiko yang ada karena dapat mempengaruhi operasi, tujuan, dan profit perusahaan. Dengan memperhitungkan berbagai risiko yang mungkin terjadi, sebuah perusahaan kemudian memutuskan apakah ia bersedia untuk berinvestasi dalam suatu negara. Beberapa jenis risiko yang menjadi pertimbangan utama perusahaan multinasional adalah kondisi politik nasional, kondisi infrastruktur, dan kondisi birokrasi suatu negara, serta banyak tidaknya kebijakan yang menghambat munculnya kewirausahaan (*entrepreneurship*) di negara tersebut. Untuk meningkatkan masuknya investasi, suatu negara haruslah memiliki kebijakan atau memenuhi kondisi-kondisi yang dapat meminimalkan risiko-risiko tersebut. Hal ini dikarenakan perusahaan multinasional hanya akan masuk ke dalam suatu negara bila situasi dan kondisi negara itu sendiri menunjang untuk pengembangan usaha (Nizamuddin, 2007).

2.1.5.5 Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah anggota dewan komisaris yang dimiliki oleh perusahaan, terdiri dari komisaris utama, komisaris independen, dan komisaris. Kedudukan masing-masing anggota dewan komisaris, termasuk komisaris utama adalah setara. Pada teori agensi, dewan komisaris

dibutuhkan untuk memonitor dan mengendalikan tindakan manajer karena perilaku oportunistanya (Jensen dan Mecking, 1976). Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada dewan direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *good corporate governance* (KNKG, 2006). Akan tetapi, dewan komisaris tidak diperbolehkan untuk ikut serta dalam mengambil keputusan operasional. Collier dan Gregory (dalam Hadi dan Sabeni, 2002) berpendapat bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan manajemen dan *monitoring* yang dilakukan akan semakin efektif.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian mengenai pengungkapan laporan tahunan telah dilakukan. Namun, masih sedikit penelitian yang meneliti tentang pengungkapan *corporate governance*. Hal ini mungkin disebabkan karena isu mengenai *corporate governance* baru muncul setelah krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997.

Hossain dan Khan (2006) melakukan survei pada 100 perusahaan sampel yang terdaftar di *Dhaka Stock Exchange* (DSE) dan atau *Chittagong Stock Exchange* (CSE) pada tahun 2004. Pada survei tersebut ditemukan adanya pengaruh signifikan dari karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan *corporate governance*. Karakteristik perusahaan tersebut diantaranya: perusahaan multinasional, hubungan auditor dengan *The Big Four*, kepemilikan terkonsentrasi

oleh sponsor, dan perusahaan perbankan. Dalam survei mereka, indeks pengungkapan *corporate governance* berdasarkan pada 25 *item* pengungkapan.

Bhuiyan dan Biswas (2007) melakukan survei mengenai pengungkapan *corporate governance* pada perusahaan perseroan terbatas yang terdaftar di *Dhaka Stock Exchange* (DSE) dengan menggunakan sampel secara acak sebanyak 155 perusahaan. Ada 45 *item* pengungkapan yang dipertimbangkan dalam survei mereka. Untuk memudahkan analisisnya, maka digunakan *Corporate Governance Disclosure Index* (CGDI). Dalam penelitian tersebut, diteliti tentang pengungkapan *corporate governance* dengan menggunakan karakteristik perusahaan sebagai variabel independennya. Karakteristik perusahaan terdiri dari besar perusahaan, kepemilikan lokal, perusahaan multinasional, lembaga keuangan, umur *listing* perusahaan, pemberitahuan SEC, dan ukuran dewan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan *corporate governance* dipengaruhi secara signifikan oleh kepemilikan lokal, pemberitahuan SEC, dan besar perusahaan. Sedangkan perusahaan multinasional, lembaga keuangan, umur *listing* perusahaan dan ukuran dewan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan *corporate governance*.

Kusumawati (2007) melakukan penelitian mengenai pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan *corporate governance* pada perusahaan publik yang terdaftar di JSX. Variabel kontrol yang digunakan terdiri dari: besar perusahaan, *listing* status, status auditor, kelompok industri, dan kepemilikan dispersi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh profitabilitas secara negatif terhadap pengungkapan *corporate governance*. Variabel kontrol

yang mempengaruhi secara signifikan terhadap pengungkapan *corporate governance* adalah besar perusahaan, *listing* status, status auditor dan kelompok industri, sedangkan kepemilikan dispersi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate governance*.

Selain penelitian yang disebutkan di atas, masih terdapat banyak penelitian untuk menguji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengungkapan. Hasil dari penelitian tersebut akan diringkas pada tabel hasil penelitian berikut ini.

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Variabel Dependen	Variabel Independen	Hasil Penelitian
1	Subiyantoro (1998)	Luas kelengkapan pengungkapan	Total aktiva, total penjualan, rasio ungkitan, rentabilitas ekonomi, <i>profit margin</i> , rasio likuiditas, tipe industri	Luas kelengkapan pengungkapan dipengaruhi oleh total aktiva, rasio ungkitan, dan rasio likuiditas secara signifikan.
2	Suripto (1999)	Luas pengungkapan sukarela	<i>Size</i> , rasio ungkitan, rasio likuiditas, basis, waktu terdaftar, penerbitan sekuritas dan kelompok industri	<i>Size</i> , rasio ungkitan, rasio likuiditas, basis, waktu terdaftar, penerbitan sekuritas, dan kelompok industri perusahaan secara bersama-sama mempunyai kemampuan untuk menjelaskan variasi luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan. <i>Size</i> dan penerbitan sekuritas berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela.
3	Gunawan (2000)	Luas pengungkapan informasi	Tingkat likuiditas, tingkat	Besar perusahaan dan tingkat solvabilitas berpengaruh secara

			solvabilitas, besar perusahaan, jenis industri	signifikan terhadap luas pengungkapan informasi.
4	Marwata (2000)	Kualitas ungkapan sukarela	Besar perusahaan, rasio ungkitan, rasio likuiditas, basis perusahaan, umur perusahaan, penerbitan sekuritas, struktur pemilikan	Besar perusahaan dan penerbitan sekuritas mampu menjelaskan variasi kualitas ungkapan sukarela.
5	Fitriani (2001)	Luas kelengkapan pengungkapan wajib dan sukarela	Besar perusahaan, tingkat <i>leverage</i> , tingkat likuiditas, status perusahaan, kelompok industri, <i>net profit margin</i> , jenis KAP	Besar perusahaan, status perusahaan, kelompok industri, <i>net profit margin</i> , dan jenis KAP berpengaruh terhadap luas pengungkapan wajib. Besar perusahaan, status perusahaan, <i>net profit margin</i> , dan jenis KAP berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela. Luas kelengkapan pengungkapan wajib dan sukarela dipengaruhi oleh besar perusahaan, status perusahaan, kelompok industri, <i>net profit margin</i> , dan jenis KAP.
6	Hadi dan Sabeni (2002)	Luas pengungkapan sukarela	<i>Size</i> perusahaan, proporsi kepemilikan saham oleh publik, basis perusahaan, solvabilitas, dan likuiditas	Luas pengungkapan sukarela dipengaruhi secara simultan oleh <i>size</i> perusahaan, proporsi kepemilikan saham oleh publik, basis perusahaan, solvabilitas dan likuiditas. Basis perusahaan dan ukuran perusahaan mempengaruhi luas pengungkapan sukarela.
7	Yularto dan	Luas	<i>Size</i> perusahaan,	Size dan basis perusahaan

	Chariri (2003)	pengungkapan sukarela	<i>leverage</i> , basis perusahaan, likuiditas, umur, reputasi KAP, prosentase saham publik	berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela tahun 1996 dan 1998. Umur dan reputasi KAP berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela untuk tahun 1996. Prosentase saham publik berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela untuk tahun 1998.
8	Simanjuntak dan Widiastuti (2004)	Luas kelengkapan pengungkapan	<i>Leverage</i> , likuiditas, profitabilitas, porsi saham publik, dan umur perusahaan	<i>Leverage</i> , likuiditas, profitabilitas, porsi saham publik, dan umur perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap luas kelengkapan pengungkapan laporan keuangan. <i>Leverage</i> , profitabilitas, dan porsi saham publik berpengaruh terhadap luas kelengkapan pengungkapan laporan keuangan.
9	Murtanto dan Elvina (2005)	Luas pengungkapan sukarela	Besaran perusahaan, rasio ungkitan, rasio likuiditas, basis perusahaan, penerbitan saham, kelompok industri	Tidak ada satupun variabel yang berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela.
10	Sembiring (2005)	Luas pengungkapan tanggung jawab sosial	<i>Size</i> perusahaan, profile, ukuran dewan komisaris, <i>leverage</i> dan profitabilitas	<i>Size</i> perusahaan, profile dan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Tingkat <i>leverage</i> dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap luas

				pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
11	Alsaeed (2006)	Luas pengungkapan sukarela	<i>Size</i> perusahaan, rasio utang, <i>ownership dispersion</i> , umur perusahaan, <i>profit margin</i> , ROE, likuiditas, tipe industri, ukuran audit firm	Variabel yang memiliki hubungan secara signifikan dengan luas pengungkapan sukarela, yaitu ukuran perusahaan.
12	Almilia dan Retrinasari (2007)	Luas kelengkapan pengungkapan wajib dan sukarela	Rasio likuiditas, rasio <i>leverage</i> , rasio <i>net profit margin</i> , besar perusahaan, status perusahaan	Rasio likuiditas, rasio <i>leverage</i> , besar perusahaan, dan status perusahaan berpengaruh terhadap luas pengungkapan wajib. Tidak ada variabel yang berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela. Rasio likuiditas, besar perusahaan, dan status perusahaan berpengaruh terhadap luas kelengkapan pengungkapan wajib dan sukarela.

Sumber: berbagai jurnal

2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian

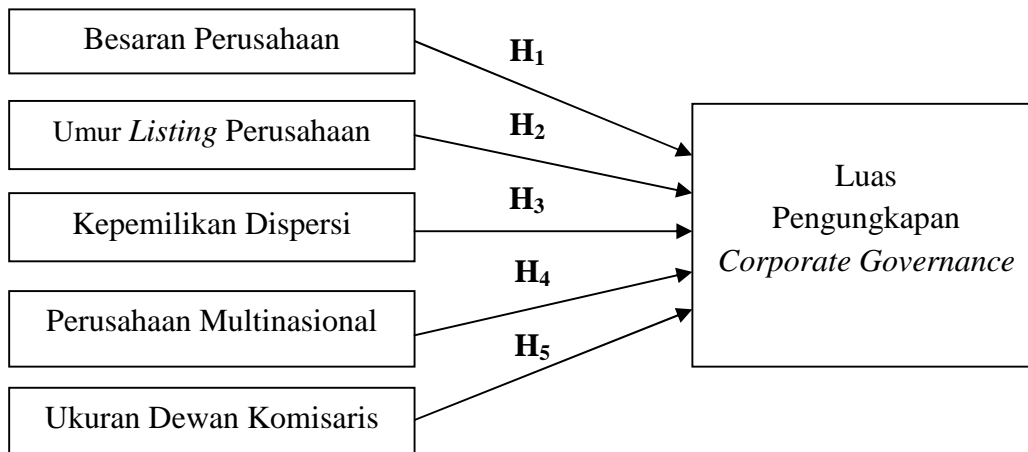
Dalam penelitian ini, akan diuji faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan *corporate governance* dalam laporan tahunan perusahaan publik di Indonesia. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen yaitu luas pengungkapan *corporate governance* pada laporan tahunan perusahaan, baik pengungkapan wajib maupun sukarela. Variabel independen terdiri dari lima variabel, yaitu besaran perusahaan,

umur *listing* perusahaan, kepemilikan dispersi, perusahaan multinasional, dan ukuran dewan komisaris.

Berdasarkan uraian tersebut, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat diimplementasikan sebagai berikut.

Gambar 2.1

Model Kerangka Pemikiran Penelitian



2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Besaran Perusahaan terhadap Luas Pengungkapan *Corporate Governance*

Dalam teori keagenan, dijelaskan bahwa perusahaan besar merupakan entitas yang banyak disorot oleh pasar maupun publik secara umum (Marwata, 2001). Sebagai wujud akuntabilitas manajemen kepada publik, maka perusahaan besar akan mengungkapkan informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan kecil. Variabel ini sering diteliti dan hasilnya cukup konsisten berpengaruh positif secara signifikan terhadap luas pengungkapan dalam

penelitian-penelitian sebelumnya Wallace, Zarzeki, Suripto, Darmawati, Marwata, Gunawan, dan Komalasari (dalam Murni, 2004).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₁ : Terdapat pengaruh positif besaran perusahaan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

2.4.2 Pengaruh Umur *Listing* Perusahaan terhadap Luas Pengungkapan *Corporate Governance*

Yularto dan Chariri (2003) berpendapat bahwa umur perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan. Perusahaan yang sudah berdiri lebih lama diasumsikan telah memiliki banyak *stakeholders*. Hal ini menyebabkan perusahaan mengungkapkan informasi seluas-luasnya sebagai wujud dari tanggung jawab perusahaan kepada *stakeholders*. Di sisi lain, *stakeholders* juga menuntut perusahaan untuk mengungkapkan informasi secara detail agar dapat digunakan untuk mengetahui kondisi perusahaan sebenarnya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₂ : Terdapat pengaruh positif umur *listing* perusahaan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

2.4.3 Pengaruh Kepemilikan Dispersi terhadap Luas Pengungkapan *Corporate Governance*

Dalam teori agensi, dinyatakan bahwa tingkat pengungkapan akan lebih tinggi pada perusahaan yang mempunyai tingkat kepemilikan dispersi lebih tinggi

(Haniffa dan Cooke, 2002 dalam Kusumawati,2007). Kepemilikan dispersi diartikan sebagai kepemilikan saham yang tersebar oleh banyak investor. Masing-masing investor memiliki kebutuhan mengenai informasi perusahaan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, semakin terdispersinya kepemilikan saham perusahaan, maka akan semakin luas pengungkapan mengenai *corporate governance* yang diungkapkan. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dari masing-masing investor dan sekaligus sebagai wujud tanggung jawabnya kepada investor.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₃ : Terdapat pengaruh positif kepemilikan dispersi terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

2.4.4 Pengaruh Perusahaan Multinasional terhadap Luas Pengungkapan *Corporate Governance*

Teori agensi menjelaskan bahwa konflik antara prinsipal dan agen dikarenakan adanya ketidakpercayaan prinsipal kepada agen. Agen dianggap tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976). Pada perusahaan multinasional, konflik keagenan cenderung lebih besar dibandingkan dengan perusahaan nasional karena jumlah prinsipal dan agen yang lebih banyak. Oleh karena itu, pengawasan terhadap agen pada perusahaan multinasional lebih ketat. Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat, perusahaan multinasional akan mengungkapkan informasi lebih luas dibandingkan dengan perusahaan nasional, termasuk dalam mengungkapkan

informasi mengenai *corporate governance*. Hossain dan Rahman Khan (2006) menunjukkan bahwa perusahaan multinasional berpengaruh positif secara signifikan terhadap pengungkapan *corporate governance* di Bangladesh.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₄ : Terdapat pengaruh positif perusahaan multinasional terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

2.4.5 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Luas Pengungkapan *Corporate Governance*

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa dewan komisaris dibutuhkan untuk memonitor dan mengendalikan tindakan manajemen karena perilaku oportunitisnya. Collier dan Gregory (dalam Sembiring, 2005) menyatakan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan dan mengawasi kinerja manajer secara efektif. Oleh karena itu, pengungkapan yang dilakukan oleh manajemen juga akan semakin besar. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Arifin (dalam Sembiring, 2005) yang menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₅ : Terdapat pengaruh positif ukuran dewan komisaris terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.1.1 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan *corporate governance* pada laporan tahunan perusahaan. Sebuah indeks pengungkapan dibentuk sebagai standar untuk mengukur tingkat pengungkapan *corporate governance* pada perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penentuan indeks pengungkapan ini berdasarkan pada informasi yang diungkapkan oleh perusahaan dalam laporan tahunan mereka bagi *stakeholders*.

Metode yang digunakan untuk membuat indeks pengungkapan *corporate governance* adalah mengaplikasikan indeks tidak tertimbang dengan menggunakan nilai dikotomis, yaitu nilai 1 untuk *item* yang diungkapkan dan nilai 0 untuk *item* yang tidak diungkapkan. *Item-item* pengungkapan yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan Lembaga Keuangan dalam Peraturan X.K.6 Nomor: Kep-134/BL/2006 dan Pedoman Umum Penerapan Good Corporate Governance Indonesia (KNKG, 2006). *Item-item* tersebut diklasifikasikan menjadi 16 *point item* yang terdiri dari pemegang saham; dewan komisaris; dewan direksi; komite audit; komite nominasi dan remunerasi; komite manajemen risiko; komite-komite lain yang dimiliki perusahaan; sekretaris perusahaan; pelaksanaan pengawasan dan pengendalian internal; manajemen risiko perusahaan; perkara penting yang

dihadapi oleh perusahaan, anggota dewan direksi, dan anggota dewan komisaris; akses informasi dan data perusahaan; etika perusahaan; tanggung jawab sosial; pernyataan penerapan *good corporate governance*; dan informasi penting lainnya yang berkaitan dengan penerapan *good corporate governance*. Dari keenam belas *point item* tersebut, dibagi menjadi 105 *item* pengungkapan yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh perusahaan mengungkapkan informasi mengenai *corporate governance*.

Berdasarkan penelitian Bhuiyan dan Biswas (2007), indeks pengungkapan *corporate governance* pada laporan tahunan perusahaan dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IPCG = \frac{\text{total skor } item \text{ yang diungkapkan oleh perusahaan}}{\text{skor maksimum yang seharusnya diungkapkan oleh perusahaan}} \quad (3.1)$$

3.1.2 Variabel Independen

3.1.2.1 Besaran Perusahaan

Besaran perusahaan menunjukkan besar kecilnya kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Besaran perusahaan diukur dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan (Subiyantoro, 1998; Suripto, 1999; Gunawan, 2000; Marwata, 2000; Fitriani, 2001; Hadi dan Sabeni, 2002; Yularto dan Chariri, 2003; Murtanto dan Elvina, 2005; Almilia dan Retrinasari, 2007; Alsaeed, 2007, Kusumawati, 2007). Variabel ini kemudian akan ditransformasikan dalam logaritma natural. Hal ini dilakukan karena untuk menghindari fluktuasi data yang berlebih.

3.1.2.2 Umur *Listing* Perusahaan

Variabel ini diukur menggunakan umur perusahaan yang merupakan selisih tahun sampel dengan tahun *first issue* (Marwata, 2000; Yularto dan Chariri, 2003; Simanjuntak dan Widiastuti, 2004; Bhuiyan dan Biswas, 2007).

3.1.2.3 Kepemilikan Dispersi

Kepemilikan dispersi merupakan kepemilikan saham tersebar yang dimiliki oleh investor individu. Investor individu meliputi investor di luar manajemen, selain pemerintah, institusi, dan kalangan keluarga (Alsaeed, 2006). Kepemilikan dispersi diukur dengan membandingkan jumlah saham yang dimiliki oleh investor individu dengan jumlah saham yang beredar.

3.1.2.4 Perusahaan Multinasional

Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang cakupan usahanya di berbagai negara. Variabel ini merupakan variabel dummy, nilai 1 untuk perusahaan multinasional dan nilai 0 untuk perusahaan nasional (Hossain dan Khan, 2006; Bhuiyan dan Biswas, 2007).

3.1.2.5 Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah anggota dewan komisaris perusahaan (Sembiring, 2005). Dalam KNKG (2004), dijelaskan bahwa dewan komisaris bertanggungjawab dan berwenang mengawasi tindakan manajemen, dan memberikan nasihat kepada manajemen jika dipandang perlu oleh dewan komisaris. Pengukuran dewan komisaris dalam penelitian ini yaitu jumlah anggota dewan komisaris dalam perusahaan, yang terdiri dari komisaris utama, komisaris independen, dan komisaris.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang sahamnya terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2007 dan 2008. Jumlah populasi sampai tahun 2008 sebanyak 393 perusahaan. Berdasarkan populasi tersebut dapat ditentukan sampel sebagai objek penelitian. Teknik pemilihan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan yang secara berturut-turut menyediakan laporan tahunan di Bursa Efek Indonesia tahun 2007 dan 2008.
2. Perusahaan yang menyajikan laporan tahunan dalam bentuk bahasa Indonesia atau dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan selain bahasa Indonesia.
3. Data yang tersedia adalah lengkap, yaitu data yang diperlukan untuk mendeteksi pengungkapan *corporate governance*.

Berdasarkan kriteria di atas, maka didapat jumlah sampel yang dipakai dalam penelitian ini sebanyak 126 perusahaan yang mengungkapkan *corporate governance*.

Penelitian ini menggunakan laporan tahunan perusahaan tahun 2007 dan 2008 karena didasarkan pada pertimbangan bahwa ada kebijakan baru yang dikeluarkan oleh BAPEPAM mengenai kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik, yaitu lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan Lembaga Keuangan dalam Peraturan X.K.6 Nomor: Kep-134/BL/2006. Peraturan ini berlaku untuk penyusunan laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada atau setelah 31 Desember 2006.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu berupa laporan tahunan perusahaan publik tahun 2007 dan 2008. Sumber data yang digunakan merupakan publikasi laporan tahunan masing-masing perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia yang diperoleh di Pojok BEI Universitas Diponegoro, www.idx.co.id, dan *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD).

3.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen dan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini. Dokumen yang dimaksud adalah laporan tahunan perusahaan yang disediakan oleh Pojok BEI dan www.idx.co.id, serta data yang tersedia di *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD).

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan variabel-variabel dalam penelitian ini. Alat analisis yang digunakan adalah rata-rata, maksimal, minimal, dan standar deviasi untuk mendeskripsikan variabel penelitian.

3.5.2 Analisis Regresi Berganda

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model persamaan regresi berganda untuk menguji adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Model yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel-variabel terhadap pengungkapan *corporate governance* dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

$$\text{IPCG} = {}_0a + {}_1\text{LNASET} + {}_2\text{UMUR} + {}_3\text{DISP} + {}_4\text{PMN} + {}_5\text{KOM} + \quad (3.2)$$

Keterangan:

IPCG = indeks pengungkapan *corporate governance*

LNASET = ukuran perusahaan

UMUR = umur *listing* perusahaan

DISP = kepemilikan dispersi

PMN = perusahaan multinasional

KOM = ukuran dewan komisaris

a = konstanta

= koefisien regresi

= kesalahan residual

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi berganda, dalam penelitian ini digunakan uji asumsi klasik sebagai berikut:

3.5.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen memiliki distribusi data yang normal atau tidak. Dalam penelitian ini digunakan dua cara untuk melakukan uji normalitas data, yaitu analisis grafik dan analisis statistik.

1. Analisis Grafik

Alat uji yang digunakan adalah dengan analisis grafik histogram dan analisis grafik normal plot. Dasar pengambilan keputusannya adalah (Ghozali, 2006):

- a. Jika titik menyebar di sekitar garis diagonal dan atau mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika titik menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2. Analisis Statistik

Selain menggunakan grafik, penelitian ini juga menggunakan uji statistik dengan *Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S)*. Dasar pengambilan keputusan pada analisis *Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S)* adalah (Ghozali, 2006):

- a. Apabila nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* kurang dari 0,05, maka H_0 ditolak. Hal ini berarti data residual terdistribusi tidak normal.

- b. Apabila nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0,05, maka H_0 diterima. Hal ini berarti data residual terdistribusi normal.

Uji statistik tidak hanya menggunakan analisis *Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S)* tetapi juga dapat dilakukan dengan melihat nilai *skewness* dan *kurtosis* dari residualnya (Ghozali, 2006).

Nilai z statistik dapat dihitung dengan rumus:

$$Z_{skewness} = \frac{Skewness}{\sqrt{6/N}} \quad (3.3)$$

$$Z_{kurtosis} = \frac{Kurtosis}{\sqrt{24/N}} \quad (3.4)$$

Dasar pengambilan keputusan dari uji *skewness* dan *kurtosis* adalah (Ghozali, 2006):

- Jika nilai $Z_{hitung} < Z_{tabel}$, maka distribusi data normal.
- Jika nilai $Z_{hitung} > Z_{tabel}$, maka distribusi data tidak normal.

Nilai N dalam penghitungan statistik merupakan jumlah sampel penelitian.

3.5.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas diperlukan untuk menguji ada tidaknya korelasi antarvariabel independen. Model regresi yang baik tidak terjadi korelasi antarvariabel independen. Apabila variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasinya 0 dengan variabel independen yang lain. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya, yaitu *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena $VIF =$

1/tolerance). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 .

3.5.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah varian residual yang tidak konstan pada regresi sehingga akurasi hasil prediksi menjadi meragukan. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Heteroskedastisitas menggambarkan nilai hubungan antara nilai yang diprediksi dengan *studentized delete residual* nilai tersebut. Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dari pola gambar *scatterplot* model. Dasar analisis heteroskedastisitas (Ghozali, 2006):

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.5.4 Uji Hipotesis

3.5.4.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji Statistik F dilakukan untuk menguji kemampuan seluruh variabel independen secara bersama-sama dalam menjelaskan perilaku variabel dependen.

Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikansi tingkat 0,05 ($\alpha = 5\%$).

Ketentuan penolakan atau penerimaan hipotesis adalah sebagai berikut:

- a. Jika signifikansi $\geq 0,05$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara bersama-sama variabel independen tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika signifikansi $\leq 0,05$ maka hipotesis tidak dapat ditolak (koefisien regresi signifikan). Ini berarti bahwa secara bersama-sama variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3.5.4.2 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Setelah melakukan secara simultan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian untuk mengetahui kemampuan masing-masing variabel independen dalam menjelaskan perilaku variabel dependen dengan uji statistik t. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikansi level 0,05 ($\alpha = 5\%$). Penolakan atau penerimaan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika signifikansi $\geq 0,05$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika signifikansi $\leq 0,05$ maka hipotesis tidak dapat ditolak (koefisien regresi signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3.5.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Semakin besar

nilai koefisien determinasi berarti semakin besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Sebaliknya, semakin kecil nilai koefisien determinasi berarti semakin kecil kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen atau sangat terbatas. Nilai koefisien determinasi ditunjukkan dengan nilai *adjusted R Square* bukan *R Square* dari model regresi karena *R Square* bias terhadap jumlah variabel dependen yang dimasukkan ke dalam model, sedangkan *adjusted R Square* dapat naik turun jika suatu variabel independen ditambahkan dalam model (Ghozali, 2006).

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang mempublikasikan laporan tahunannya di Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut dari tahun 2007 dan 2008. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling*, yaitu metode penentuan sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Dari sejumlah 393 perusahaan sebagai populasi, melalui prosedur penentuan sampel sebagaimana dipaparkan dalam bab III, diperoleh sampel sebanyak 126 perusahaan. Hasil dari proses penentuan sampel dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1

Gambaran Umum Sampel Penelitian

Kriteria	Jumlah perusahaan
Jumlah perusahaan publik yang terdaftar di BEI hingga tahun 2008	393
Pengurangan sampel kriteria 1: Perusahaan yang tidak berturut-turut menyediakan laporan tahunan di BEI 2007 dan 2008	(219)
Pengurangan sampel kriteria 2: Perusahaan yang menyajikan laporan tahunan dalam bahasa asing	(12)
Pengurangan sampel kriteria 3: Perusahaan yang tidak menyajikan data secara lengkap untuk mendeteksi pengungkapan <i>corporate governance</i>	(36)
Jumlah sampel penelitian satu periode	<u>126</u>

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2010

Tabel 4.2

Hasil Analisis Deskriptif Indeks Pengungkapan *Corporate Governance* pada Perusahaan Multinasional dan Perusahaan Nasional

Jenis Perusahaan	Jumlah Perusahaan	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Std Deviasi
Multinasional	98	0,14	0,81	0,4714	0,14493
Nasional	154	0,10	0,82	0,4062	0,15763

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2010

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, diketahui bahwa jumlah perusahaan multinasional lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah perusahaan nasional. Perusahaan multinasional sebanyak 98 perusahaan, sedangkan perusahaan nasional sebanyak 154 perusahaan.

Indeks pengungkapan *corporate governance* pada perusahaan multinasional memiliki nilai rata-rata sebesar 0,4714. Nilai minimum sebesar 0,14 dimiliki oleh PT Unggul Indah Cahaya, Tbk dan nilai maksimum sebesar 0,81 dimiliki oleh PT Astra Otoparts, Tbk.

Pada perusahaan nasional, rata-rata indeks pengungkapan *corporate governance* sebesar 0,4062. Nilai minimum sebesar 0,10 PT Metro Supermarket Realty, Tbk dan nilai maksimum sebesar 0,82 dimiliki oleh PT Bank CIMB Niaga, Tbk.

Deskripsi variabel lain yang berskala rasio atau interval disajikan dalam tabel 4.3 berikut ini.

Tabel 4.3

Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Standar Deviasi
IPCG	252	0,10	0,82	0,4316	0,15581
LNASET	252	6,34	19,12	14,3716	2,03742
UMUR	252	1	31	12,00	5,725
DISP	252	0,00	0,97	0,3015	0,18791
KOM	252	1	12	4,68	2,064
Valid N (listwise)	252				

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2010

Dari tabel 4.6, nilai rata-rata indeks pengungkapan *corporate governance* (IPCG) sebesar 0,4316. Nilai minimum sebesar 0,10 dimiliki oleh PT Metro Supermarket Realty, Tbk dan nilai maksimum sebesar 0,82 dimiliki oleh PT Bank CIMB Niaga, Tbk.

Variabel besaran perusahaan (LNASET) yang diukur dengan menggunakan nilai logaritma natural total aset menunjukkan rata-rata sebesar 14,3716. Nilai minimum sebesar 6,34 dimiliki oleh PT Indoexchange, Tbk dan nilai maksimum sebesar 19,12 dimiliki oleh PT Bank Negara Indonesia, Tbk.

Nilai umur *listing* perusahaan (UMUR) memperlihatkan bahwa rata-rata sebesar 12,00. Nilai minimum sebesar 1 dimiliki oleh lima perusahaan, yaitu PT Bank Bukopin, Tbk; PT Bank Bumi Arta, Tbk; PT Mobile-8 Telecom, Tbk; PT Total Bangun Persada, Tbk; dan PT Truba Manunggal Engineering, Tbk. Nilai maksimum sebesar 31 dimiliki oleh PT Holcim Indonesia, Tbk.

Variabel kepemilikan dispersi (DISP) yang dihitung dari hasil pembagian saham yang dimiliki oleh investor individu dengan jumlah keseluruhan saham

perusahaan yang beredar menunjukkan rata-rata sebesar 0,3015 atau 30,15%. Nilai minimum sebesar 0,00 atau 0% dimiliki oleh dua perusahaan, yaitu PT Excelcomindo, Tbk dan PT Alfa Retailindo, Tbk. Nilai maksimum sebesar 0,97 atau 97% dimiliki oleh PT Sierad Produce, Tbk.

Variabel ukuran dewan komisaris (KOM) diukur berdasarkan jumlah anggota dewan komisaris perusahaan. Berdasarkan tabel 4.6 ukuran dewan komisaris ditunjukkan dengan rata-rata sebesar 4,68. Hal ini berarti bahwa rata-rata perusahaan sampel memiliki keanggotaan dewan komisaris sebanyak 5 orang. Anggota dewan komisaris berkisar antara minimum 1 orang sampai maksimum 12 orang. Nilai minimum 1 orang dimiliki oleh PT Bank Century, Tbk dan nilai maksimum 12 orang dimiliki oleh PT Lippo Karawaci, Tbk.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian terhadap hipotesis dengan metode regresi linear, diperlukan uji asumsi klasik atas model yang digunakan untuk memastikan bahwa dalam penelitian ini data yang digunakan terdistribusi secara normal, tidak terjadi multikolinearitas, dan heteroskedastisitas.

4.2.1.1 Uji Normalitas

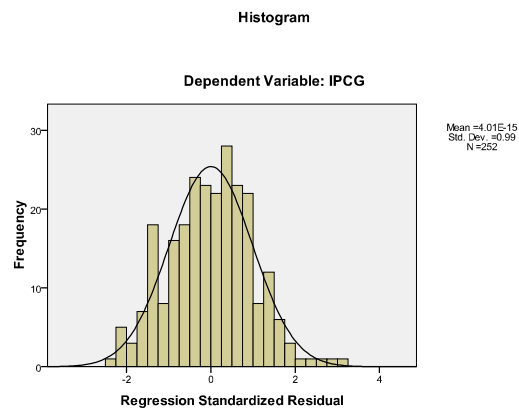
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data

normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini digunakan dua cara untuk melakukan uji normalitas data, yaitu analisis grafik dan analisis statistik.

Untuk menguji normalitas data secara grafik menggunakan histogram dan *normal probability plot* yang dapat digambarkan sebagai berikut.

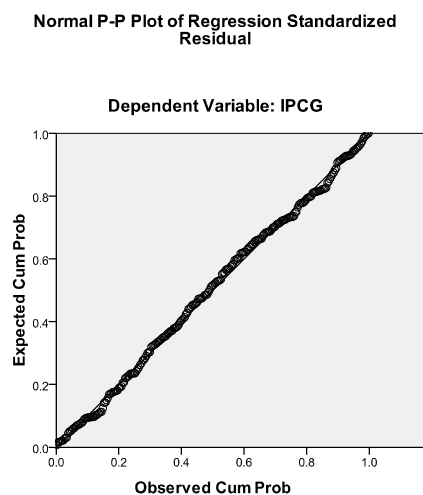
Gambar 4.1

Hasil Uji Normalitas : Grafik Histogram



Gambar 4.2

Hasil Uji Normalitas : Grafik *Normal P-P Plot*



Dari gambar 4.1 dijelaskan bahwa grafik histogram membentuk lonceng atau pola distribusi normal dan pada gambar 4.2 penyebaran titik-titik berada di sekitar garis diagonal dan searah garis diagonal.

Berikut ini adalah uji statistik untuk menguji normalitas data yaitu uji *Kolmogorov Smirnov Z* dan uji *Skewness and Kurtosis*.

Tabel 4.4

Hasil Uji *Kolmogorov-Smirnov Z*

	Unstandardized Residual
N	252
Normal Parameters ^{a,b}	0,0000000
	0,12630696
Most Extreme Differences	0,036
	0,036
	-0,031
Kolmogorov-Smirnov Z	0,578
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,892

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2010

Tabel 4.5

Hasil Uji *Skewness and Kurtosis*

	N	Skewness	Kurtosis
Unstandardized Residual	252	0,073	-0,088
Valid N (listwise)	252		

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2010

Berdasarkan pada tabel 4.4, uji normalitas terhadap data residual menunjukkan bahwa besarnya *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar 0,892 diatas tingkat signifikansi 0,05. Pada tabel 4.5, ditunjukkan bahwa nilai *skewness* sebesar 0,073

dan *kurtosis* sebesar -0,088. Dari nilai *skewness* dan *kurtosis* dapat dihitung *Zskewness* dan *Zkurtosis* sebagai berikut:

$$\begin{aligned} Z_{skewness} &= \frac{0,073}{\sqrt{6/252}} \\ &= 0,473 \end{aligned} \qquad \begin{aligned} Z_{kurtosis} &= \frac{-0,088}{\sqrt{24/252}} \\ &= -0,285 \end{aligned}$$

Nilai Z_{tabel} untuk signifikansi 0,05 adalah sebesar 1,96. Nilai *skewness* $Z_{hitung} < Z_{tabel}$, yaitu $0,473 < 1,96$ dan nilai *kurtosis* $Z_{hitung} < Z_{tabel}$, yaitu $-0,285 < 1,96$.

Berdasarkan analisis grafik dan statistik di atas dapat diketahui bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

4.2.1.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antarvariabel independen. Model regresi yang baik tidak terjadi korelasi antarvariabel independen. Uji ini dapat dilihat dari nilai tolerance dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai *cut-off* yang umum dipakai adalah nilai tolerance 0,10 atau sama dengan nilai VIF diatas 10 sehingga data yang tidak terkena multikolonieritas nilai toleransinya harus lebih dari 0,10 atau VIF kurang dari 10.

Tabel 4.6

Hasil Uji Multikolinearitas: Nilai *Tolerance* dan VIF

Variabel Independen	Tolerance	VIF
Besaran Perusahaan	0,633	1,580
Umur <i>Listing</i> Perusahaan	0,954	1,048
Kepemilikan Dispersi	0,978	1,022
Perusahaan Multinasional	0,774	1,292
Ukuran Dewan Komisaris	0,736	1,360

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2010

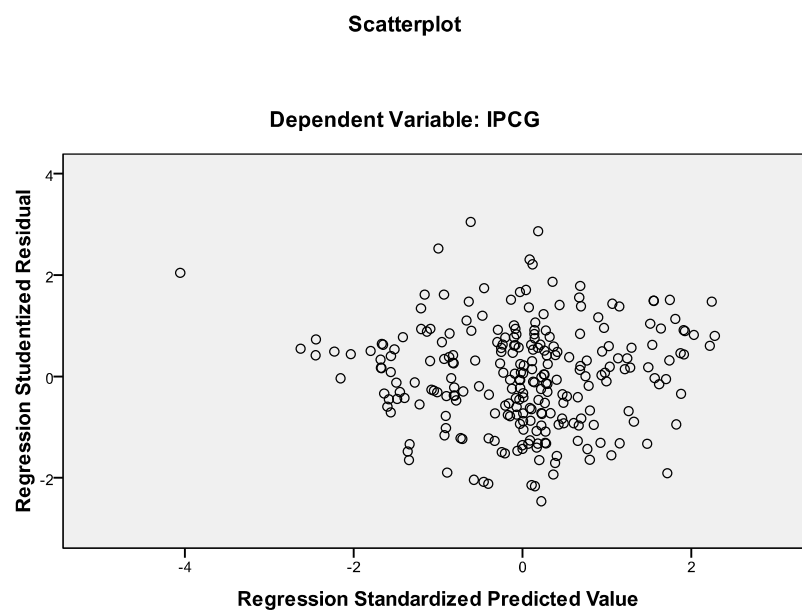
Hasil pengujian *tolerance* menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,10 (10%). Hasil perhitungan VIF juga menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antara variabel independen dalam model regresi.

4.2.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ditunjukkan dengan menggunakan grafik *Scatter Plot* antara variabel dependen (SRESID) dan variabel residualnya (ZPRED). Grafik ini menunjukkan pola penyebaran titik-titik. Jika titik-titik menyebar di atas dan di bawah 0 pada sumbu Y, berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada data yang akan digunakan.

Gambar 4.3

Hasil Uji Heteroskedastisitas: Grafik *Scatter Plot*



Berdasarkan gambar 4.3 di atas, terlihat titik-titik yang tersebar secara acak, tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi pengungkapan *corporate governance* perusahaan.

4.2.2 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen, yaitu besaran perusahaan, umur *listing* perusahaan, kepemilikan saham oleh investor individu, perusahaan multinasional, dan ukuran dewan komisaris terhadap luas pengungkapan *corporate governance*. Untuk mengetahui seberapa besar dan bagaimana pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang ditunjukkan pada tabel 4.7 berikut ini.

Tabel 4.7

Hasil Analisis Regresi Berganda

Variabel Independen	B	t	Signifikansi
Besar Perusahaan	0,606	9,325	0,000
Umur <i>Listing</i> Perusahaan	0,032	0,612	0,541
Kepemilikan Dispersi	-0,002	-0,040	0,968
Perusahaan Multinasional	-0,068	-1,164	0,246
Ukuran Dewan Komisaris	0,005	0,083	0,934
<i>R Square</i> = 0,343			
<i>Adjusted R Square</i> = 0,329			
F = 25,668			
Signifikansi = 0,000			

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2010

Berdasarkan hasil output SPSS yang terlampir, diperoleh persamaan fungsi regresi linear berganda sebagai berikut:

$$\text{IPCG} = 0,606\text{LNASET} + 0,032\text{UMUR} - 0,002\text{DISP} - 0,068\text{PMN} + 0,005\text{KOM}$$

Pada tabel 4.7, diketahui bahwa koefisien determinasi yang ditunjukkan dengan nilai *adjusted R Square* sebesar 0,343. Hal ini berarti bahwa 34,3% variasi indeks pengungkapan *corporate governance* dapat dijelaskan secara signifikan oleh besaran perusahaan (LNASET), umur *listing* perusahaan (UMUR), kepemilikan dispersi (DISP), perusahaan multinasional (PMN), dan ukuran dewan komisaris (KOM), sedangkan 65,7% indeks pengungkapan *corporate governance* dapat dijelaskan oleh variabel lain.

Dari hasil pengujian dengan nilai F, terlihat bahwa nilai $F = 25,668$ dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,000. Karena probabilitas signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama pengungkapan *corporate governance* dapat dijelaskan oleh variabel besaran perusahaan (LNASET), umur *listing* perusahaan (UMUR), kepemilikan dispersi (DISP), perusahaan multinasional (PMN), dan ukuran dewan komisaris (KOM).

Variabel besaran perusahaan (LNASET) probabilitas signifikansinya sebesar 0,000. Dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa **H₁ diterima** sehingga besaran perusahaan berpengaruh positif secara signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance* dalam laporan tahunan perusahaan publik di Indonesia.

Pada variabel umur *listing* perusahaan (UMUR) probabilitas signifikansi sebesar 0,541. Hal ini menunjukkan bahwa probabilitas signifikansi lebih besar

dari 0,05 sehingga **H₂ ditolak**. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa umur *listing* perusahaan tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance* dalam laporan tahunan perusahaan publik di Indonesia.

Probabilitas signifikansi pada variabel kepemilikan dispersi (DISP) sebesar 0,968. Dengan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa **H₃ ditolak**. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan dispersi tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance* dalam laporan tahunan perusahaan publik di Indonesia.

Pada variabel perusahaan multinasional (PMN) terlihat probabilitas signifikansi sebesar 0,246. Nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 berarti variabel perusahaan multinasional tidak signifikan pada tingkat 5%. Kesimpulannya adalah **H₄ ditolak**, sehingga perusahaan multinasional tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance* dalam laporan tahunan perusahaan publik di Indonesia.

Pada variabel ukuran dewan komisaris (KOM) diperoleh probabilitas signifikansi sebesar 0,934. Dengan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat diambil kesimpulan bahwa **H₅ ditolak**. Artinya adalah ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance* dalam laporan tahunan perusahaan publik di Indonesia.

Tabel 4.8

Ringkasan Hasil Hipotesis Penelitian

Hipotesis	Hasil
H₁: Terdapat pengaruh besaran perusahaan terhadap luas pengungkapan <i>corporate governance</i>	H₁ diterima
H₂: Terdapat pengaruh umur <i>listing</i> perusahaan terhadap luas pengungkapan <i>corporate governance</i>	H₂ ditolak
H₃: Terdapat pengaruh kepemilikan dispersi terhadap luas pengungkapan <i>corporate governance</i>	H₃ ditolak
H₄: Terdapat pengaruh perusahaan multinasional terhadap luas pengungkapan <i>corporate governance</i>	H₄ ditolak
H₅: Terdapat pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap luas pengungkapan <i>corporate governance</i>	H₅ ditolak

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2010

4.3 Interpretasi Hasil

4.3.1 Pengaruh Besaran Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan *Corporate Governance*

Hasil pengujian untuk variabel besaran perusahaan menunjukkan bahwa besaran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate governance*. Hasil ini konsisten dengan penelitian Kusumawati (2007) yang menunjukkan bahwa besaran perusahaan berpengaruh positif secara signifikan terhadap pengungkapan *corporate governance*. Akan tetapi, hasil tersebut tidak konsisten dengan penelitian Murtanto dan Elvina (2005), yaitu bahwa variabel besaran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan.

Perusahaan besar merupakan entitas yang banyak disorot oleh pasar maupun publik secara umum sehingga mengungkapkan lebih banyak informasi merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk mewujudkan akuntabilitas publik.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin besar perusahaan akan mendorong peningkatan luas pengungkapan *corporate governance*. Sebaliknya, semakin kecil perusahaan, maka terjadi pula penurunan pada luas pengungkapan *corporate governance*.

4.3.2 Pengaruh Umur *Listing* Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan

Corporate Governance

Dari pengujian hipotesis, diperoleh hasil bahwa variabel umur *listing* perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*. Hasil ini konsisten dengan penelitian Bhuiyan dan Biswas (2007) bahwa umur *listing* perusahaan tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance*. Sebaliknya, hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Yularto dan Chariri (2002) yang menunjukkan bahwa umur *listing* perusahaan berpengaruh positif secara signifikan terhadap pengungkapan pada periode sebelum krisis moneter.

Berdasarkan data variabel penelitian yang terlampir (Lampiran C), dapat dilihat bahwa terdapat variasi yang beragam pada jumlah IPCG baik pada perusahaan dengan umur yang tua maupun perusahaan dengan umur yang muda. Banyak perusahaan dengan umur yang tua melakukan pengungkapan *corporate governance* secara sempit, sedangkan banyak perusahaan dengan umur yang muda melakukan pengungkapan *corporate governance* secara luas. Sebagai contoh, jumlah IPCG pada PT Bank Bukopin, Tbk yang berumur *listing* 1 tahun sebesar 0,70 sedangkan jumlah IPCG pada PT Holcim Indonesia, Tbk yang

berumur *listing* 31 tahun hanya sebesar 0,30. Oleh karena itu, variabel umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

4.3.3 Pengaruh Kepemilikan Dispersi Terhadap Luas Pengungkapan *Corporate Governance*

Hasil pengujian hipotesis untuk variabel kepemilikan dispersi menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*. Hasil ini sesuai dengan penelitian Alsaeed (2006) bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan kepemilikan dispersi terhadap pengungkapan. Kepemilikan dispersi diwakili oleh proporsi saham yang dimiliki oleh investor individu. Jumlah kepemilikan saham tersebut tersebar kepada banyak investor. Karena kepemilikan saham dari masing-masing investor menjadi sangat kecil, maka tidak mampu untuk menekan pihak manajemen, termasuk pada pengungkapan *corporate governance*.

Pada hasil statistik deskriptif (tabel 4.3), diketahui bahwa rata-rata variabel kepemilikan dispersi sebesar 0,3015. Perusahaan dengan tingkat dispersi tinggi atau di atas rata-rata diasumsikan akan melakukan pengungkapan *corporate governance* secara luas. Namun, hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat perusahaan dengan tingkat kepemilikan dispersi yang tinggi hanya mengungkapkan sedikit pengungkapan *corporate governance*. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat kepemilikan dispersi rendah melakukan pengungkapan *corporate governance* secara lebih luas. Hal ini berarti bahwa tinggi rendahnya kepemilikan dispersi tidak mempengaruhi luas pengungkapan *corporate governance*.

4.3.4 Pengaruh Perusahaan Multinasional Terhadap Luas Pengungkapan

Corporate Governance

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, ditunjukkan bahwa variabel perusahaan multinasional tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*. Hasil ini konsisten dengan penelitian Bhuiyan dan Biswas (2007) yang menunjukkan bahwa perusahaan multinasional tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate governance*. Namun, hasil ini tidak konsisten dengan penelitian Hossain dan Khan (2006) yang membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif secara signifikan perusahaan multinasional terhadap pengungkapan *corporate governance*.

Berdasarkan tabel 4.2, jumlah perusahaan multinasional sebanyak 98 perusahaan dengan rata-rata pengungkapan *corporate governance* pada perusahaan multinasional sebesar 0,4714. Rata-rata tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pengungkapan *corporate governance* pada perusahaan nasional. Akan tetapi, perusahaan multinasional yang melakukan pengungkapan *corporate governance* lebih tinggi dari jumlah rata-rata hanya 45 perusahaan, sedangkan perusahaan multinasional yang melakukan pengungkapan *corporate governance* lebih rendah dari jumlah rata-rata sebanyak 53 perusahaan (Lampiran C). Ini berarti bahwa masih banyak perusahaan multinasional yang melakukan pengungkapan *corporate governance* secara sempit. Maka dapat disimpulkan, tidak semua perusahaan multinasional akan melakukan pengungkapan *corporate governance* secara luas sehingga perusahaan

multinasional tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

4.3.5 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Luas Pengungkapan *Corporate Governance*

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*. Hasil ini tidak konsisten dengan penelitian Sembiring (2005) yang menemukan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif secara signifikan terhadap pengungkapan. Akan tetapi hasil ini konsisten dengan penelitian Bhuiyan dan Biswas (2007) yaitu bahwa ukuran dewan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate governance*.

Di dalam perusahaan, dewan komisaris bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat serta saran kepada manajemen mengenai pilihan strategis bagi manajemen dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya jumlah anggota dewan komisaris yang besar, maka dimungkinkan saran yang diberikan kepada manajemen bermacam-macam sehingga kinerja manajemen menjadi kurang efektif termasuk dalam pengambilan keputusan, termasuk pengungkapan *corporate governance*.

Selain alasan di atas, terdapat juga alasan lain yang memungkinkan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance*. Ketika dalam suatu perusahaan diadakan pemilihan anggota dewan komisaris, tidak menutup kemungkinan bahwa dewan direksi menunjuk seseorang atau beberapa orang untuk dijadikan sebagai anggota dewan

komisaris. Jika hal ini terjadi, maka dapat menyebabkan fungsi dewan komisaris tidak berjalan dengan efektif karena dewan komisaris akan mempertimbangkan kepentingan dewan direksi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan *corporate governance* dalam laporan tahunan perusahaan publik di Indonesia pada tahun 2007 dan 2008. Sampel penelitian dalam satu periode adalah 126 perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Karena menggunakan tahun sampel 2007 dan 2008, maka sampel perusahaan sebanyak 252 perusahaan. Penelitian ini menggunakan indeks pengungkapan *corporate governance* sebanyak 105 *item* pengungkapan. Indeks ini dibangun berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan Lembaga Keuangan No. KEP-134/BL/2006 peraturan X.K.6 dan Pedoman Umum Good Corporate Governance (KNKG, 2006).

Dari hasil analisis data, pengujian hipotesis, dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Variabel besar perusahaan mempengaruhi luas pengungkapan *corporate governance* secara signifikan. Semakin besar total aset, maka semakin luas pengungkapan *corporate governance*.
2. Umur *listing* perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*. Perusahaan yang berdiri lebih lama tidak melakukan pengungkapan *corporate governance* dengan lebih luas dibandingkan dengan perusahaan yang umurnya lebih muda.

3. Tidak terdapat pengaruh variabel kepemilikan dispersi terhadap luas pengungkapan *corporate governance* secara signifikan. Perusahaan yang dengan proporsi kepemilikan dispersi yang tinggi belum tentu melakukan pengungkapan *corporate governance* secara lebih luas.
4. Luas pengungkapan *corporate governance* tidak dipengaruhi secara signifikan oleh perusahaan multinasional. Tidak semua perusahaan multinasional melakukan pengungkapan *corporate governance* secara luas.
5. Variabel ukuran dewan komisaris tidak mempengaruhi luas pengungkapan *corporate governance* secara signifikan. Perusahaan dengan jumlah anggota dewan komisaris yang besar tidak mengungkapkan pengungkapan *corporate governance* dengan lebih luas.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang kemungkinan dapat mempengaruhi hasil penelitian, antara lain:

1. Periode penelitian hanya dua tahun, yaitu tahun 2007 dan tahun 2008.
2. Dalam penelitian ini, indeks pengungkapan *corporate governance* laporan tahunan perusahaan ditentukan atas dasar interpretasi peneliti setelah membaca isi laporan tahunan (*annual report*) perusahaan yang diteliti. Hal ini memungkinkan terjadinya perbedaan penilaian antar perusahaan karena kondisi subyektifitas peneliti.

3. *Item* pengungkapan yang digunakan dalam penelitian ini dinilai dengan cara tanpa pembobotan dimana masing-masing *item* diberlakukan secara sama, sehingga tidak memperhitungkan tingkat bobot masing-masing *item* pengungkapan.

5.3 Saran

Dengan memperhatikan beberapa keterbatasan penelitian yang telah disampaikan, maka dapat diberikan saran-saran untuk penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah periode penelitian sehingga sampel penelitian yang digunakan lebih besar.
2. Penilaian indeks pengungkapan *corporate governance* dapat dilakukan dengan melibatkan beberapa peneliti sehingga dapat memperkecil tingkat subyektifitas penilaian indeks pengungkapan *corporate governance*.
3. *Item* pengungkapan diberikan bobot sehingga dapat diperhitungkan tingkat bobot dari masing-masing *item* pengungkapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Almilia, Luciana Spica dan Ikka Retrinasari. 2007. "Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Kelengkapan Pengungkapan dalam Laporan Tahunan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEJ", *Proceeding Seminar Nasional*
- Alsaeed, Khaled. 2006. "The Association Between Firm-Specific Characteristics and Disclosure", *Managerial Auditing Journal*, Vol. 21, No. 5, pp. 476-496, www.emeraldinsight.com
- Bhuiyan, Md Hamid Ullah and P.K. Biswas. 2007. "Corporate Governance and Reporting: An Empirical Study of The Listed Companies in Bangladesh", *Journal of Business Studies*, Vol. XXVIII, No. 1, www.ssrn.com
- Darmawati, D., Khomsiyah, dan R.G. Rahayu. 2005. "Hubungan Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan", *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Vol. 8, No. 1, Hal. 65-81
- Fitriani. 2001. "Signifikansi Perbedaan Tingkat Kelengkapan Pengungkapan Wajib dan Sukarela pada Laporan Keuangan Perusahaan Publik yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta", *Simposium Nasional Akuntansi*, hal. 133-154
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Gunawan, Yuniati. 2000. "Analisis Pengungkapan Informasi Laporan Tahunan pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta", *Simposium Nasional Akuntansi III*, hal. 78-98
- Hadi, Noor. dan Arifin Sabeni. 2002. "Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan Sukarela dalam Laporan Tahunan Go Publik di BEJ", *Jurnal Maksi*, Vol. 1, hal. 90-105
- Hidayah, Erna. 2008. "Pengaruh Kualitas Pengungkapan Informasi Terhadap Hubungan Antara Penerapan Corporate Governance dengan Kinerja Perusahaan di Bursa Efek Jakarta", *Jurnal Akuntansi Auditing Indonesia*, Vol. 12, No. 1, Hal. 53-64
- Hossain, Dewan Mahboob and Arifur Rahman Khan. 2006. "Disclosure on Corporate Governance Issues in Bangladesh: A Survey of The Annual Report", *The Bangladesh Accountant* 50(23): 95-99, www.ssrn.com

- Isgiyarta, Jaka dan Nila Tristiarini. 2005. "Pengaruh Penerapan Prinsip Corporate Governance Terhadap Abnormal Return pada saat Pengumuman Laporan Keuangan", *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, Vol. 12, No. 2, Hal. 169-187
- Jensen, M.C dan William H. Meckling. 1976. "Theory of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs, and Ownership Structure", *Journal of Financial Economics*, Vol. 3, No. 4, pp. 305-360, www.ssrn.com
- Kamsiatun. 2007. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan Sukarela dalam Laporan Tahunan Perusahaan Multinasional", *Skripsi Tidak Dipublikasikan*, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro
- Komite Nasional Kebijakan Governance. 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, Jakarta
- Kusumawati, Dwi Novi 2007. "Profitability and Corporate Governance Disclosure: An Indonesian Study", *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Vol. 10, No. 2, Hal. 131-146
- Lastanti, Hexana Sri 2005. "Hubungan Struktur Corporate Governance dengan Kinerja Perusahaan dan Reaksi Pasar", *Proceeding Konferensi Nasional Akuntansi*, Hal. 1-17
- Marwata. 2001. "Hubungan Antara Karakteristik Perusahaan dan Kualitas Ungkapan Sukarela dalam Laporan Tahunan Perusahaan Publik di Indonesia", *Simposium Nasional Akuntansi IV*, Hal. 155-173
- Murni, Siti Asih. 2004. "Pengaruh Luas Ungkapan Sukarela dan Asimetri Informasi Terhadap Cost of Equity Capital pada Perusahaan Publik di Indonesia", *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Vol. 7, No. 2, Hal. 192-206
- Murtanto dan Elvina. 2005. "Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Sukarela dalam Laporan Tahunan Perusahaan yang Terdaftar di BEJ", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 6, No. 1, Hal. 47-57
- Na'im, Ainun dan Fu'ad Rakhman. 2000. "Analisis Hubungan Antara Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan dengan Struktur Modal dan Tipe Kepemilikan Perusahaan", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 15, No. 1, Hal. 70-82
- Nizamuddin, Ali. M. 2007. "Multinational Corporations and Economic Development: The Lesson of Singapore." *Forum: International Social Science Review*, www.britannica.com

- OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). 1999. OECD Principles of Corporate Governance. *OECD Publications Service*. France: 9-19
- Santoso, Singgih. 2004. *SPSS Versi 10: Mengolah Data Statistik Secara Profesional*. Cetakan 5. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Sembiring, Eddy Rismanda. 2005. “Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan tanggung Jawab Sosial: Studi Empiris pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Jakarta”, *Simposium Nasional Akuntansi VIII*
- Simanjuntak, B. H. dan Lusy Widiastuti. 2004. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdapat di Bursa Efek Jakarta”, *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Vol. 7, No. 3, Hal. 351-366
- Subiyantoro, Edi. 1998. “Hubungan Antara Kelengkapan pengungkapan laporan Keuangan dengan Karakteristik Perusahaan Publik di Indonesia”, *Simposium Nasional I*
- Suripto, Bambang. 1999. “Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan Sukarela dalam Laporan Tahunan”, *Simposium Nasional Akuntansi II*
- Yularto, P.A. dan A. Chariri. 2003. “Analisis Perbandingan Luas Pengungkapan Sukarela dalam Laporan Tahunan Perusahaan yang Terdaftar di BEJ Sebelum Krisis dan pada Periode Krisis”, *Jurnal Maksi*, Vol. 2, Hal. 1-21

LAMPIRAN A

DAFTAR PERUSAHAAN SAMPEL PENELITIAN

NO	KODE	NAMA PERUSAHAAN
1	ABBA	PT Abdi Bangsa, Tbk
2	AKRA	PT AKR Corporindo, Tbk
3	ALFA	PT Alfa Retailindo, Tbk
4	ANTA	PT Anta Express Tour and Travel, Tbk
5	APOL	PT Arpeni Pratama Ocean Line, Tbk
6	ARTA	PT Arthavest, Tbk
7	AMFG	PT Asahimas Flat Glass, Tbk
8	AKSI	PT Asia Kapitalindo Securities, Tbk
9	ASGR	PT Astra Graphia, Tbk
10	ASII	PT Astra International, Tbk
11	AUTO	PT Astra Otoparts, Tbk
12	ASBI	PT Asuransi Bintang, Tbk
13	ASDM	PTAsuransi Dayin Mitra, Tbk
14	AHAP	PT Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk
15	AMAG	PT Asuransi Multi Artha Guna, Tbk
16	BNBR	PT Bakrie and Brothers, Tbk
17	UNSP	PT Bakrie Sumatra Plantations, Tbk
18	ELTY	PT Bakrieland Development, Tbk
19	AGRO	PT Bank Agro Niaga, Tbk
20	BBKP	PT Bank Bukopin, Tbk
21	BNBA	PT Bank Bumi Arta, Tbk
22	BABP	PT Bank Bumiputera Indonesia, Tbk

23	BCIC	PT Bank Century, Tbk
24	BDMN	PT Bank Danamon Indonesia, Tbk
25	BEKS	PT Bank Eksekutif, Tbk
26	BKSW	PT Bank Kesawan, Tbk
27	MAYA	PT Bank Mayapada International, Tbk
28	MEGA	PT Bank Mega, Tbk
29	BBNI	PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk
30	BNGA	PT Bank CIMB Niaga (formerly Bank Niaga), Tbk
31	NISP	PT Bank NISP, Tbk
32	PNBN	PT Bank Pan Indonesia, Tbk
33	BNLI	PT Bank Permata, Tbk
34	BVIC	PT Bank Victoria International, Tbk
35	BRPT	PT Barito Pasific Timber, Tbk
36	BAYU	PT Bayu Buana, Tbk
37	BLTA	PT Berlian Laju Tanker, Tbk
38	BCAP	PT Bhakti Capital Indonesia, Tbk
39	BIPP	PT Bhuwanatala Indah Permai, Tbk
40	BUMI	PT Bumi Resources (formerly Bumi Modern), Tbk
41	CENT	PT Centrin Online, Tbk
42	CMPP	PT Centris Multipersada Pratama, Tbk
43	CTRA	PT Ciputra Development, Tbk
44	CTRS	PT Ciputra Surya, Tbk
45	CMNP	PT Citra Marga Nusaphala Persada, Tbk
46	CTBN	PT Citra Turbindo, Tbk
47	CFIN	PT Clipan Finance, Tbk
48	SCBD	PT Danayasa Arthatama, Tbk

49	DVLA	PT Darya Varia Laboratoria, Tbk
50	KARK	PT Dayaindo Resources International (formerly Karka Yasa Profilia), Tbk
51	EPMT	PT Enseval Putera Megatrading, Tbk
52	GSMF	PT Equity Development Investment, Tbk
53	EXCL	PT Excelcomindo Pratama, Tbk
54	FASW	PT Fajar Surya Wisesa, Tbk
55	FAST	PT Fast Food Indonesia, Tbk
56	BMTR	PT Global Mediacom (formerly Bimantara Citra), Tbk
57	GMTD	PT Gowa Makassar Tourism Development, Tbk
58	GMCW	PT Grahamas Citrawisata, Tbk
59	HEXA	PT Hexindo Adiperkasa, Tbk
60	SMCB	PT Holcim Indonesia, Tbk
61	SHID	PT Hotel Sahid Jaya International, Tbk
62	HITS	PT Humpuss Intermoda Transportasi, Tbk
63	INDX	PT Indoexchange, Tbk
64	INDF	PT Indofood Sukses Makmur, Tbk
65	ISAT	PT Indosat, Tbk
66	IDKM	PT Indosiar Karya Media, Tbk
67	INTD	PT Inter Delta, Tbk
68	DILD	PT Intiland Development (formerly Dharmala Intiland), Tbk
69	INTA	PT Intraco Penta, Tbk
70	ICON	PT Island Concept Indonesia, Tbk
71	JSPT	PT Jakarta Setiabudi International, Tbk
72	JPFA	PT JAPFA (formerly JAPFA Comfeed Indonesia), Tbk
73	KBLM	PT Kabelindo Murni, Tbk
74	KBLF	PT Kalbe Farma, Tbk

75	KAEF	PT Kimia Farma (Persero), Tbk
76	LTLS	PT Lautan Luas, Tbk
77	LPCK	PT Lippo Cikarang, Tbk
78	LPGI	PT Lippo General Insurance, Tbk
79	LPKR	PT Lippo Karawaci, Tbk
80	LPPS	PT Lippo Securities, Tbk
81	TCID	PT Mandom Indonesia, Tbk
82	MPPA	PT Matahari Putra Prima, Tbk
83	MTSM	PT Metro Supermarket Realty, Tbk
84	MTDL	PT Metrodata Electronics, Tbk
85	MAPI	PT Mitra Adi Perkasa, Tbk
86	MITI	PT Mitra Investindo (formerly Siwani Trimitra), Tbk
87	FREN	PT Moblie-8 Telecom, Tbk
88	MDRN	PT Modern International (formerly Modern Photo Film Company), Tbk
89	MDLN	PT Modernland Realty, Tbk
90	MLBI	PT Multibintang Indonesia, Tbk
91	UNIT	PT Nusantara Inti Corpora (formerly United Capital Indonesia), Tbk
92	LPPF	PT Pacific Utama (formerly Lippo Pacific), Tbk
93	PANR	PT Panorama Sentrawisata, Tbk
94	PJAA	PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk
95	KONI	PT Perdana Bangun Pusaka, Tbk
96	PGAS	PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk
97	PTRO	PT Petrosea, Tbk
98	PLIN	PT Plaza Indonesia Realty, Tbk
99	POOL	PT Pool Advista Indonesia, Tbk
100	LSIP	PT PP London Sumatera Indonesia, Tbk

101	RIMO	PT Rimo Catur Lestari, Tbk
102	RODA	PT Royal Oaks Development Asia(formerly Roda Panggon Harapan),Tbk
103	SMSM	PT Selamat Sempurna, Tbk
104	SMGR	PT Semen Gresik (Persero), Tbk
105	BKSL	PT Sentul City (formerly Bukit Sentul), Tbk
106	SIPD	PT Sierad Produce, Tbk
107	SMAR	PT Sinar Mas Agro Resourches and Technology, Tbk
108	SOBI	PT Sorini Agro Asia Corporindo (formerly Sorini Corporation), Tbk
109	SULI	PT Sumalindo Lestari Jaya, Tbk
110	SCMA	PT Surya Citra Media, Tbk
111	SSIA	PT Surya Semesta Internusa, Tbk
112	SIIP	PT Suryainti Permata, Tbk
113	PTBA	PT Tambang Batubara Bukit Asam, Tbk
114	TLKM	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk
115	TGKA	PT Tigaraksa Satria, Tbk
116	TOTL	PT Total Bangun Persada, Tbk
117	TRST	PT Trias Sentosa, Tbk
118	TRUB	PT Truba Alam Manunggal Engineering, Tbk
119	TURI	PT Tunas Ridean, Tbk
120	ULTJ	PT Ultrajaya Milk Industry and Trading Company, Tbk
121	UNIC	PT Unggul Indah Cahaya, Tbk
122	UNTR	PT United Tractors, Tbk
123	WAPO	PT Wahana Phonix Mandiri, Tbk
124	WICO	PT Wicaksana Overseas International, Tbk
125	WOMF	PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk
126	ZBRA	PT Zebra Nusantara, Tbk

LAMPIRAN B

DAFTAR *ITEM* PENGUNGKAPAN *CORPORATE GOVERNANCE*

NO	ITEM POINT	ITEM PENGUNGKAPAN
1	Pemegang Saham	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uraian mengenai hak pemegang saham 2. Pernyataan mengenai jaminan perlindungan hak atas pemegang saham perlakuan yang setara terhadap semua pemegang saham 3. Tanggal pelaksanaan RUPS 4. Hasil RUPS
2	Dewan Komisaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama-nama anggota dewan komisaris 2. Status setiap anggota (komisaris independen atau komisaris bukan independen) 3. Latar belakang pendidikan dan karier dewan komisaris 4. Uraian mengenai tugas dan tanggung jawab dewan komisaris 5. Kebijakan dan jumlah remunerasi anggota dewan komisaris 6. Mekanisme dan kriteria penilaian sendiri (<i>self assestment</i>) tentang kinerja masing-masing anggota dewan komisaris 7. Jumlah rapat yang dilakukan 8. Jumlah kehadiran setiap anggota dewan komisaris dalam rapat 9. Mekanisme pengambilan keputusan 10. Program pelatihan dewan komisaris
3	Dewan Direksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama-nama anggota direksi dengan jabatan dan fungsinya masing-masing 2. Uraian mengenai tugas dan tanggung jawab direksi 3. Latar belakang pendidikan dan karier anggota direksi

		<p>4. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota direksi</p> <p>Penjelasan ringkas mengenai mekanisme kerja direksi:</p> <p>5. Mekanisme pengambilan keputusan</p> <p>6. Mekanisme pendelegasian wewenang</p> <p>7. Kebijakan dan jumlah remunerasi anggota direksi</p> <p>8. Jumlah rapat yang dilakukan oleh direksi</p> <p>9. Jumlah kehadiran setiap anggota direksi dalam rapat</p> <p>10. Mekanisme dan kriteria penilaian terhadap kinerja para anggota direksi</p> <p>11. Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi direksi</p>
4	Komite Audit	<p>1. Nama dan jabatan anggota komite audit</p> <p>2. Riwayat hidup singkat setiap anggota komite audit</p> <p>3. Uraian tugas dan tanggung jawab komite audit</p> <p>4. Jumlah pertemuan yang dilakukan oleh komite audit</p> <p>5. Jumlah kehadiran setiap anggota dalam rapat</p> <p>6. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite audit</p> <p>7. Independensi anggota komite audit</p> <p>8. Keberadaan piagam komite audit (<i>Audit Commitee Charter</i>)</p>
5	Komite Nominasi Dan Remunerasi	<p>1. Nama dan jabatan anggota komite nominasi dan remunerasi</p> <p>2. Riwayat hidup singkat setiap anggota komite nominasi dan remunerasi</p> <p>3. Uraian tugas dan tanggung jawab komite nominasi dan remunerasi</p> <p>4. Jumlah pertemuan yang dilakukan oleh komite nominasi dan remunerasi</p>

		5. Jumlah kehadiran setiap anggota dalam rapat 6. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite nominasi dan remunerasi 7. Independensi anggota komite nominasi dan remunerasi
6	Komite Manajemen Risiko	1. Nama dan jabatan anggota komite manajemen risiko 2. Riwayat hidup singkat setiap anggota komite manajemen risiko 3. Uraian tugas dan tanggung jawab komite manajemen risiko 4. Jumlah pertemuan yang dilakukan oleh komite manajemen risiko 5. Jumlah kehadiran setiap anggota dalam rapat 6. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite manajemen risiko 7. Independensi anggota komite manajemen risiko
7	Komite-Komite Lain yang Dimiliki Perusahaan	1. Nama dan jabatan anggota komite 2. Riwayat hidup singkat setiap anggota komite 3. Uraian tugas dan tanggung jawab komite 4. Jumlah pertemuan yang dilakukan oleh komite 5. Jumlah kehadiran setiap anggota dalam rapat 6. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite 7. Independensi anggota komite
8	Sekretaris Perusahaan	1. Nama sekretaris perusahaan 2. Riwayat singkat sekretaris perusahaan 3. Uraian mengenai tugas dan tanggung jawab sekretaris perusahaan
9	Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Internal (<i>Internal</i>	1. Informasi tentang keberadaan SPI (Satuan Pengawas Internal) 2. Jumlah anggota SPI 3. Jabatan masing-masing anggota SPI

	<i>Audit and Control)</i>	4. Uraian mengenai tugas dan tanggung jawab SPI 5. Uraian mengenai aktivitas SPI selama setahun 6. Penjelasan mengenai audit internal perusahaan
10	Manajemen Risiko Perusahaan	1. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi oleh perusahaan 2. Upaya untuk mengelola risiko-risiko tersebut
11	Perkara Penting yang sedang Dihadapi oleh Perusahaan, Anggota Dewan Direksi, dan Anggota Dewan Komisaris	1. Pokok perkara/gugatan 2. Posisi kasus 3. Status penyelesaian perkara/gugatan 4. Pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan
12	Akses Informasi dan Data Perusahaan	1. Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misal: melalui <i>website</i> , media massa, <i>mailing list</i> , buletin, dan sebagainya 2. Daftar penyebaran informasi kepada publik
13	Etika Perusahaan	1. Keberadaan pedoman perilaku (<i>code of conduct</i>) 2. Isi <i>code of conduct</i> 3. Penyebaran <i>code of conduct</i> kepada karyawan dan upaya penegakannya 4. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (<i>corporate culture</i>) yang dimiliki perusahaan
14	Tanggung Jawab Sosial	➤ Karyawan 1. Uraian mengenai pengakuan hak-hak karyawan 2. Uraian mengenai persamaan kesempatan kepada seluruh karyawan 3. Uraian mengenai jaminan terciptanya lingkungan kerja yang kondusif

		<p>4. Komitmen perusahaan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja</p> <p>5. Manajemen keselamatan kerja</p> <p>➤ Keberadaan peraturan keselamatan kerja</p> <p>➤ Konsumen</p> <p>6. Deskripsi mengenai komitmen perusahaan terhadap perlindungan konsumen</p> <p>➤ Masyarakat</p> <p>7. Program kemitraan yang dilakukan oleh perusahaan (program kemitraan dan pembinaan usaha kecil)</p> <p>8. Biaya yang dikeluarkan dalam program kemitraan</p> <p>Program Bina Lingkungan yang meliputi:</p> <p>9. Bantuan korban bencana alam atau bantuan sosial lainnya</p> <p>10. Bantuan pendidikan (beasiswa) dan pelatihan</p> <p>11. Pengembangan sarana umum</p> <p>12. Biaya yang dikeluarkan</p> <p>➤ Dialog dengan masyarakat</p> <p>➤ Lingkungan</p> <p>13. Komitmen perusahaan terhadap pelestarian lingkungan</p> <p>14. Program pelestarian lingkungan yang dilakukan perusahaan</p>
15	Pernyataan Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)	<p>1. Keberadaan prinsip-prinsip GCG</p> <p>2. Keberadaan pedoman pelaksanaan GCG (Manual GCG) dalam perusahaan</p> <p>3. Kepatuhan terhadap pedoman GCG</p> <p>4. Keberadaan <i>Board Manual</i> (Panduan bagi komisaris dan direksi dalam melaksanakan tugas)</p> <p>5. Struktur tata kelola perusahaan</p>

		6. Hasil penilaian penerapan GCG dalam setahun 7. Audit GCG (jasa attestasi) oleh eksternal auditor
16	Informasi Penting Lainnya yang Berkaitan dengan Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)	1. Visi perusahaan 2. Misi perusahaan 3. Nilai-nilai perusahaan 4. Kepemilikan saham oleh anggota dewan komisaris dan direksi beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya 5. Uraian mengenai kepatuhan terhadap peraturan perundangan peraturan pasar modal 6. Uraian mengenai transaksi dengan pihak yang memiliki benturan kepentingan 7. Uraian mengenai etika bisnis dalam perusahaan

Sumber:

- a. Keputusan Ketua BAPEPAM dan Lembaga Keuangan dalam Peraturan X.K.6 Nomor: Kep-134/BL/2006.
- b. Pedoman Umum Corporate Governance Indonesia (KNKG,2006)

LAMPIRAN B

DATA VARIABEL PENELITIAN

KODE	ASET	UMUR	DISP	PMN	KOM	LNASET	IPCG
001	4310903	17	0,51	1	4	15,28	0,70
002	3938140	11	0,29	1	5	15,19	0,46
003	4043497	18	0,36	1	3	15,21	0,37
004	199516	6	0,38	0	2	12,20	0,30
005	26556109	17	0,73	1	8	17,09	0,62
006	20348341	4	0,45	1	5	16,83	0,60
007	3928071	5	0,35	0	5	15,18	0,65
008	1400021	17	0,20	1	4	14,15	0,22
009	1305939	1	0,35	0	8	14,08	0,32
010	4991216	1	0,47	1	3	15,42	0,32
011	3730955	5	0,18	1	3	15,13	0,27
012	629491	14	0,20	1	6	13,35	0,56
013	29527466	13	0,48	1	10	17,20	0,44
014	621835	26	0,17	0	5	13,34	0,52
015	1294773	11	0,97	0	4	14,07	0,54
016	8063169	15	0,05	1	8	15,90	0,51
017	1362830	17	0,46	0	3	14,13	0,39
018	16912119	14	0,28	1	6	16,64	0,55
019	1895845	13	0,48	0	5	14,46	0,54
020	3769588	13	0,22	1	3	15,14	0,61
021	3497591	13	0,29	1	3	15,07	0,53
022	2135084	10	0,33	1	5	14,57	0,24
023	845505	15	0,30	0	3	13,65	0,48
024	2623497	18	0,24	1	6	14,78	0,43
025	1759800	12	0,15	0	9	14,38	0,72
026	2138991	17	0,58	1	4	14,58	0,26
027	7208250	30	0,23	1	7	15,79	0,54
028	8515227	16	0,24	0	6	15,96	0,58
029	1601065	18	0,25	1	3	14,29	0,61
030	432681	15	0,21	1	4	12,98	0,39
031	624557	18	0,23	1	3	13,34	0,76
032	1162251	17	0,85	0	2	13,97	0,50
033	63519598	17	0,50	1	10	17,97	0,78
034	3454254	9	0,13	1	7	15,06	0,81
035	1383840	12	0,24	0	3	14,14	0,64
036	863818	14	0,10	0	3	13,67	0,22
037	830050	11	0,30	0	3	13,63	0,49
038	3345245	12	0,14	0	5	15,02	0,35
039	13002619	18	0,29	1	5	16,38	0,52
040	24287	18	0,80	0	3	10,10	0,30
041	910085	16	0,25	0	3	13,72	0,51
042	62924	12	0,30	0	3	11,05	0,21
043	560931	13	0,07	0	3	13,24	0,54

KODE	ASET	UMUR	DISP	PMN	KOM	LNASET	IPCG
044	5138213	16	0,49	0	6	15,45	0,60
045	1386739	6	0,10	0	6	14,14	0,53
046	725197	14	0,20	0	5	13,49	0,24
047	4930022	2	0,30	1	3	15,41	0,44
048	20668625	17	0,50	1	4	16,84	0,37
049	115307	13	0,37	0	5	11,66	0,30
050	2048315	10	0,20	1	2	14,53	0,43
051	93251	16	0,16	0	3	11,44	0,12
052	18827267	2	0,00	1	10	16,75	0,51
053	45305086	13	0,45	1	10	17,63	0,65
054	4536744	1	0,26	1	4	15,33	0,36
055	82058760	12	0,31	1	5	18,22	0,74
056	688375	7	0,05	0	9	13,44	0,13
057	2094435	13	0,32	0	3	14,55	0,39
058	8403470	15	0,34	1	8	15,94	0,39
059	2959914	3	0,43	0	6	14,90	0,29
060	63421	7	0,44	0	2	11,06	0,36
061	1348755	17	0,07	0	3	14,11	0,38
062	242766	13	0,12	0	3	12,40	0,30
063	2983679	4	0,01	0	3	14,91	0,51
064	34446177	1	0,19	0	7	17,35	0,70
065	1950000	1	0,09	0	3	14,48	0,65
066	6346386	5	0,27	0	5	15,66	0,72
067	14257514	10	0,57	0	4	16,47	0,58
068	89409827	18	0,32	1	8	18,31	0,72
069	1349720	6	0,22	0	3	14,12	0,55
070	2184493	5	0,10	0	4	14,60	0,55
071	4474878	10	0,12	0	4	15,31	0,53
072	34907728	7	0,45	0	3	17,37	0,76
073	183341611	11	0,24	1	7	19,03	0,71
074	54885576	18	0,32	0	6	17,82	0,72
075	28969069	13	0,20	0	10	17,18	0,76
076	53470645	25	0,25	1	4	17,79	0,35
077	39303727	17	0,11	0	8	17,49	0,63
078	5273416	8	0,42	1	3	15,48	0,54
079	1674394	17	0,31	0	3	14,33	0,48
080	1301164	18	0,14	0	5	14,08	0,34
081	124357	10	0,57	1	3	11,73	0,36
082	60690	18	0,20	0	3	11,01	0,34
083	4812511	3	0,33	0	6	15,39	0,43
084	260255	5	0,46	0	2	12,47	0,43
085	388156	6	0,23	0	3	12,87	0,21
086	997200	6	0,10	0	3	13,81	0,47

KODE	ASET	UMUR	DISP	PMN	KOM	LNASET	IPCG
087	373353	13	0,49	1	3	12,83	0,39
088	68419	5	0,77	0	2	11,13	0,24
089	181709	18	0,19	0	4	12,11	0,66
090	236690	18	0,26	0	4	12,37	0,46
091	49503	17	0,49	0	3	10,81	0,30
092	365225	2	0,28	0	3	12,81	0,31
093	659657	10	0,16	1	3	13,40	0,51
094	136761	16	0,08	0	4	11,83	0,53
095	275122	12	0,63	1	4	12,52	0,45
096	2524873	10	0,49	0	5	14,74	0,52
097	7484109	13	0,53	1	6	15,83	0,37
098	1921280	8	0,60	0	4	14,47	0,33
099	2015697	16	0,11	1	5	14,52	0,42
100	5708016	12	0,61	0	4	15,56	0,52
101	278543	7	0,35	0	9	12,54	0,40
102	2718909	9	0,05	0	5	14,82	0,44
103	149825	6	0,42	0	3	11,92	0,25
104	1284391	10	0,43	0	6	14,07	0,37
105	10533372	11	0,56	1	12	16,17	0,48
106	1752492	14	0,53	0	4	14,38	0,17
107	98976	15	0,31	0	4	11,50	0,14
108	1277133	3	0,10	0	5	14,06	0,41
109	73807	6	0,05	0	6	11,21	0,20
110	1570853	9	0,36	0	4	14,27	0,32
111	1541071	10	0,39	1	5	14,25	0,42
112	334568	5	0,11	0	3	12,72	0,39
113	179588	18	0,30	0	3	12,10	0,30
114	586554	17	0,03	0	7	13,28	0,35
115	403298	6	0,12	0	3	12,91	0,21
116	2964660	15	0,19	1	4	14,90	0,58
117	20953	12	0,15	0	3	9,95	0,23
118	14141	2	0,04	0	3	9,56	0,26
119	14137256	18	0,61	1	4	16,46	0,64
120	15570524	12	0,25	1	7	16,56	0,53
121	159176	14	0,20	0	6	11,98	0,37
122	98708	6	0,22	1	3	11,50	0,36
123	2720480	12	0,56	1	7	14,82	0,73
124	567	6	0,60	0	3	6,34	0,31
125	1271383	3	0,73	0	5	14,06	0,35
126	2552198	5	0,13	0	4	14,75	0,42
127	4700320	18	0,71	1	4	15,36	0,46
128	4921310	12	0,36	1	6	15,41	0,25
129	5384809	19	0,41	1	3	15,50	0,41

KODE	ASET	UMUR	DISP	PMN	KOM	LNASET	IPCG
130	206763	7	0,38	0	2	12,24	0,30
131	58253000	18	0,74	1	8	17,88	0,58
132	25550580	5	0,45	1	5	17,06	0,71
133	6106828	6	0,35	0	5	15,62	0,69
134	1952035	18	0,18	1	4	14,48	0,31
135	1337631	2	0,31	0	8	14,11	0,39
136	7234690	2	0,46	1	3	15,79	0,37
137	4078616	6	0,18	1	3	15,22	0,33
138	784759	15	0,20	1	6	13,57	0,36
139	39594264	14	0,50	1	10	17,49	0,40
140	941389	27	0,17	0	5	13,76	0,35
141	1384707	12	0,97	0	5	14,14	0,42
142	10025916	16	0,05	1	8	16,12	0,42
143	1740646	18	0,38	0	3	14,37	0,43
144	17243721	15	0,27	1	6	16,66	0,33
145	2169945	14	0,33	0	5	14,59	0,36
146	3718548	14	0,22	1	3	15,13	0,46
147	4874851	14	0,29	1	3	15,40	0,52
148	3494853	11	0,33	1	5	15,07	0,24
149	1111100	16	0,12	0	3	13,92	0,52
150	3107278	19	0,24	1	6	14,95	0,14
151	1993033	13	0,15	0	7	14,51	0,52
152	2158866	18	0,41	1	3	14,59	0,30
153	7674980	31	0,23	1	6	15,85	0,30
154	10602964	17	0,23	0	6	16,18	0,71
155	2088860	19	0,06	1	4	14,55	0,46
156	459111	16	0,21	1	4	13,04	0,30
157	841054	19	0,23	1	3	13,64	0,61
158	1288796	18	0,79	0	3	14,07	0,44
159	80740000	18	0,50	1	10	18,21	0,56
160	3981316	10	0,06	1	9	15,20	0,57
161	1838946	13	0,24	0	3	14,42	0,51
162	1137218	15	0,08	0	3	13,94	0,50
163	929753	12	0,42	0	3	13,74	0,49
164	3583328	13	0,12	0	5	15,09	0,43
165	22847721	19	0,41	1	8	16,94	0,59
166	37669	19	0,67	0	3	10,54	0,33
167	790843	17	0,25	0	3	13,58	0,44
168	53558	13	0,22	0	3	10,89	0,30
169	637661	14	0,07	0	3	13,37	0,24
170	5703832	17	0,46	0	6	15,56	0,50
171	1445670	7	0,10	0	5	14,18	0,50
172	910790	15	0,21	0	5	13,72	0,34

KODE	ASET	UMUR	DISP	PMN	KOM	LNASET	IPCG
173	7294276	3	0,18	1	3	15,80	0,36
174	24976324	18	0,47	1	4	17,03	0,46
175	89798	14	0,37	0	4	11,41	0,25
176	2967702	11	0,14	1	2	14,90	0,36
177	76729	17	0,16	0	2	11,25	0,26
178	28911713	3	0,00	1	8	17,18	0,56
179	51693323	14	0,21	1	10	17,76	0,56
180	4797892	2	0,29	1	3	15,38	0,39
181	91256250	13	0,42	1	5	18,33	0,66
182	603647	8	0,00	0	9	13,31	0,13
183	2513340	14	0,31	0	4	14,74	0,42
184	9741369	16	0,43	1	6	16,09	0,32
185	3760969	4	0,35	0	5	15,14	0,27
186	71151	8	0,44	0	2	11,17	0,23
187	1525749	18	0,07	0	5	14,24	0,28
188	227557	14	0,12	0	3	12,34	0,20
189	2582432	5	0,01	0	3	14,76	0,45
190	32633063	2	0,29	0	6	17,30	0,59
191	2044367	2	0,09	0	3	14,53	0,61
192	6287879	6	0,27	0	6	15,65	0,67
193	5585890	11	0,57	0	1	15,54	0,44
194	107268363	19	0,32	1	9	18,49	0,72
195	1492166	7	0,21	0	3	14,22	0,37
196	2162316	6	0,10	0	3	14,59	0,56
197	5512694	11	0,07	0	3	15,52	0,37
198	34860872	8	0,42	0	3	17,37	0,57
199	201741069	12	0,24	1	7	19,12	0,74
200	103197574	19	0,06	0	6	18,45	0,82
201	34245838	14	0,18	0	8	17,35	0,70
202	64391915	26	0,17	1	4	17,98	0,48
203	54066977	18	0,11	0	8	17,81	0,66
204	5625108	9	0,37	1	3	15,54	0,53
205	1607442	18	0,24	0	5	14,29	0,46
206	1444602	19	0,14	0	5	14,18	0,27
207	127831	11	0,60	1	3	11,76	0,28
208	59360	19	0,20	0	3	10,99	0,30
209	3432968	4	0,33	0	6	15,05	0,22
210	179638	6	0,46	0	2	12,10	0,44
211	86165	7	0,04	0	3	11,36	0,24
212	1405989	7	0,10	0	3	14,16	0,33
213	463889	14	0,49	1	3	13,05	0,33
214	288122	6	0,45	0	2	12,57	0,11
215	200328	19	0,19	0	6	12,21	0,55

KODE	ASET	UMUR	DISP	PMN	KOM	LNASET	IPCG
216	257516	19	0,26	0	4	12,46	0,31
217	80173	18	0,35	0	4	11,29	0,40
218	437340	3	0,28	0	3	12,99	0,33
219	724797	11	0,16	1	3	13,49	0,49
220	124445	17	0,08	0	3	11,73	0,44
221	216883	13	0,63	1	4	12,29	0,49
222	2543183	11	0,44	0	4	14,75	0,29
223	8108443	14	0,52	1	6	15,91	0,33
224	2159220	9	0,46	0	4	14,59	0,31
225	2111152	17	0,14	1	6	14,56	0,44
226	8334991	13	0,61	0	6	15,94	0,66
227	287040	8	0,35	0	9	12,57	0,35
228	2688410	10	0,05	0	5	14,80	0,49
229	520468	7	0,28	0	3	13,16	0,12
230	1401409	11	0,45	0	5	14,15	0,40
231	11787777	12	0,59	1	11	16,28	0,39
232	1846260	15	0,42	0	4	14,43	0,17
233	95559	16	0,31	0	4	11,47	0,10
234	1331292	4	0,10	0	5	14,10	0,48
235	1594814	7	0,32	0	5	14,28	0,25
236	1791367	10	0,23	0	4	14,40	0,36
237	2251369	11	0,38	1	5	14,63	0,46
238	324636	6	0,11	0	3	12,69	0,41
239	213191	19	0,30	0	4	12,27	0,25
240	663217	18	0,03	0	7	13,40	0,31
241	532141	7	0,12	0	3	13,18	0,42
242	4070401	16	0,21	1	4	15,22	0,56
243	17806	13	0,15	0	3	9,79	0,29
244	14087	3	0,27	0	3	9,55	0,30
245	25417966	19	0,53	1	4	17,05	0,57
246	13720366	13	0,19	1	7	16,43	0,35
247	226259	15	0,23	0	6	12,33	0,22
248	94249	7	0,21	1	3	11,45	0,32
249	2791108	13	0,44	1	5	14,84	0,52
250	9114	7	0,25	0	3	9,12	0,26
251	1212249	4	0,59	0	5	14,01	0,32
252	2322302	6	0,14	0	4	14,66	0,28

LAMPIRAN D

HASIL ANALISIS REGRESI

UJI ASUMSI KLASIK

1. UJI NORMALITAS DATA

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

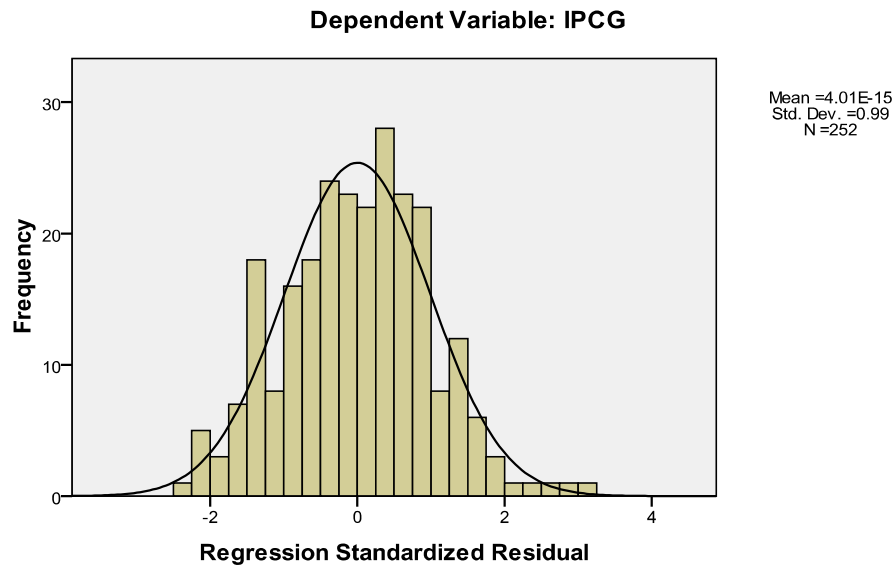
		Unstandardized Residual
N		252
Normal Parameters ^{a, b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.12630696
Most Extreme Differences	Absolute	.036
	Positive	.036
	Negative	-.031
Kolmogorov-Smirnov Z		.578
Asymp. Sig. (2-tailed)		.892

a. Test distribution is Normal.

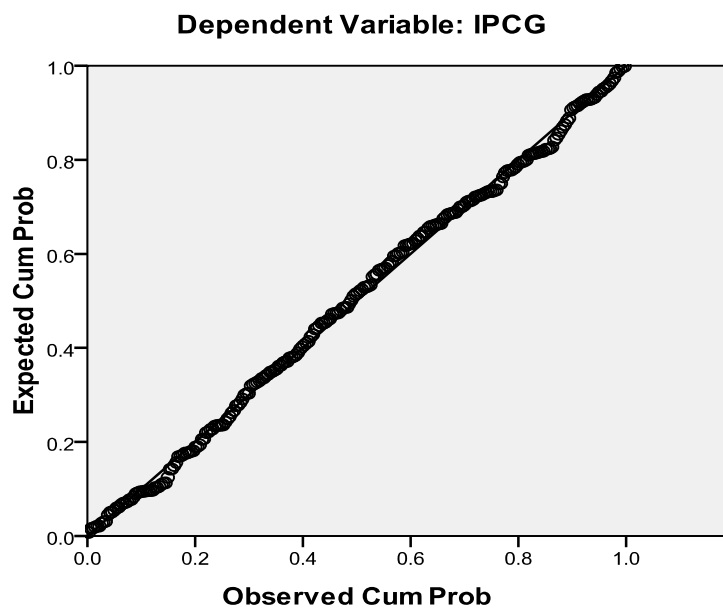
Descriptive Statistics

	N	Skewness		Kurtosis	
	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
Unstandardized Residual	252	.073	.153	-.088	.306
Valid N (listwise)	252				

Histogram



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



2. UJI MULTIKOLINEARITAS

Coefficients^a

Runs Test

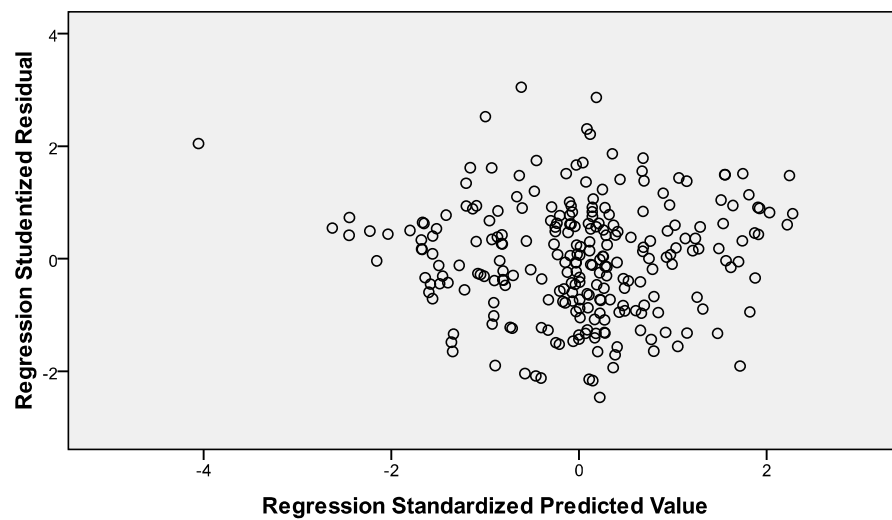
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	LNASET	.633	1.580
	UMUR	.954	1.048
	DISP	.978	1.022
	PMN	.774	1.292
	KOM	.736	1.360

a. Dependent Variable: IPCG

3. UJI HETEROSKEDASTISITAS

Scatterplot

Dependent Variable: IPCG



ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Multinasional	98	.14	.81	.4714	.14493
Nasional	154	.10	.82	.4062	.15763
Valid N (listwise)	98				

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
IPCG	252	.10	.82	.4316	.15581
LNASET	252	6.34	19.12	14.3716	2.03742
UMUR	252	1	31	12.00	5.725
DISP	252	.00	.97	.3015	.18791
KOM	252	1	12	4.68	2.064
Valid N (listwise)	252				

ANALISIS REGRESI BERGANDA

Variables Entered/Removed

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	KOM, DISP, UMUR, PMN, LNASET ^a		. Enter

a. All requested variables entered.

UJI KOEFISIEN DETERMINASI

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.586 ^a	.343	.329	.12758

a. Predictors: (Constant), KOM, DISP, UMUR, PMN, LNASET

b. Dependent Variable: IPCG

UJI SIGNIFIKANSI SIMULTAN (UJI F)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.089	5	.418	25.668	.000 ^a
	Residual	4.004	246	.016		
	Total	6.093	251			

a. Predictors: (Constant), KOM, DISP, UMUR, PMN, LNASET

b. Dependent Variable: IPCG

UJI SIGNIFIKANSI PARAMETER INDIVIDUAL (UJI T)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.238	.065		-3.658	.000
LNASET	.046	.005	.606	9.325	.000
UMUR	.001	.001	.032	.612	.541
DISP	-.002	.043	-.002	-.040	.968
PMN	-.022	.019	-.068	-1.164	.246
KOM	.000	.005	.005	.083	.934

a. Dependent Variable: IPCG